

2022

Laporan Kinerja

BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penghubung Tahun 2021-2026.

Penyusunan laporan ini mengacu kepada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Selanjutnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022, sehingga ada perubahan ke arah yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kami menyadari bahwa di dalam laporan ini masih terdapat kekurangan baik materi maupun sistematis penulisannya. Harapan kami semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat menjadi gambaran umum kinerja Badan Penghubung selama Tahun 2022 sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas publik serta dalam meningkatkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Jakarta, Januari 2023

KEPALA BADAN PENGHUBUNG



ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc.Sc.Ph.D

Pembina Tk.I /NIP. 19800904 199810 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu organisasi. Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing - masing instansi. Oleh karena itu, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebagai unsure penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan laporan kinerja Badan Penghubung tahun 2022 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3		4	5	6
1	Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah.	a.	Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.	100%	100%	100%
		b.	Persentase Aktifitas Pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100%	100%	100%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 1					100,00%
2	Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan.	a.	Jumlah Aktifitas Koordinasi Dengan Perantau yang dilaksanakan.	12 kali	14 kali	116,67%

		b.	Jumlah Pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan.	3 kali	3 kali	100,00%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 2					108,00%
3	Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat.	a.	Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat	6 kali	7 kali	116,67%
		b.	Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	2 kali	2 kali	100,00%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 3					108,00%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B (66.00)	B (62.82)	95,18%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 4					95,18%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	-	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (78.20)	Baik (85,20%)	108,95%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 5					108,95%
	Rata-Rata Capaian Sasaran 1,2,3,4 & 5					104,03%

Berdasarkan Tabel Capaian Sasaran tersebut diatas, disimpulkan bahwa dari 5 (lima) sasaran yang ditetapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan secara rata-rata sebesar **104.03%**, dengan kategori **Memuaskan**. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 ini situasi pandemi di Indonesia telah membaik dan tidak lagi diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga Badan Penghubung telah dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun.

Selanjutnya, guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Menggunakan informasi pada Laporan ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program / kegiatan tahun selanjutnya dan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;

- c. Pelaksanaan pelatihan keprotokolan bagi protokol dan sopir sehingga dapat meningkatkan kapabilitas personel pelayanan pimpinan daerah;
- d. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi masyarakat rantau;
- e. Meningkatkan kualitas sarana prasarana untuk kenyamanan pengunjung di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah serta memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- f. Menguatkan komitmen dari semua ASN dan pegawai Badan Penghubung untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang prima sebagai Duta Sumatera Barat di Jakarta.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah demi terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program dan kegiatan di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat selaku SKPD yang bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jakartamemiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur Sumatera Barat sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja tersebut dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran.Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Renstra Badan Penghubung Tahun 2021-2026.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dimaksudkan sebagai upaya pertanggungjawaban hasil/capaian kinerja instansi secara akuntabel dalam rangka mewujudkan transparansi publik.

2. TUJUAN

Tujuan dari pembuatan Laporan Kinerja Badan Penghubung adalah:

- a. Sebagai bahan akuntabilitas bagi Gubernur/Wakil Gubernur dalam mengevaluasi program/ kegiatan mulai dari proses perencanaan sampai dengan hasil/capaian kinerja selama Tahun 2022.
- b. Sebagai bahan dalam pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.
- c. Sebagai salah satu indikator dalam menganalisa tingkat kemajuan kinerja berdasarkan realisasi fisik dan keuangan berkaitan dengan kesesuaiannya dengan rencana strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Penghubung Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reuiv atas laporan kinerja instansi pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera barat Tahun 2016-2021;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Penghubung adalah termasuk Badan Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur untuk melaksanakan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan (kongkuren) yang menjadi kewenangan daerah, menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu sebanyak 32 urusan yaitu wajib dan pilihan dengan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 bahwa Badan Penghubung Daerah adalah Jabatan Administrator termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setingkat eselon III yang tidak dilakukan pemetaan, skoring dan besaran kelembagaan, sehingga tidak memiliki tipologi yang berkedudukan di Ibukota negara (Pusat Pemerintahan). Badan Penghubung Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dibentuk untuk memudahkan rentang kendali dan menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, sehingga dapat berperan dalam membantu untuk memudahkan komunikasi serta administrasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan dan membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 19 Jakarta Timur – DKI Jakarta (Gedung Hotel Balairung Lantai 4). Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menempati gedung/kantor tersebut dengan sistem sewa kepada pihak PT. Balairung Citrajaya Sumbar selaku pengelola gedung. Luas gedung/kantor yang ditempati adalah sekitar 416 m2 dengan sistem sewa per tahun. Jika dilihat dari letak/lokasi kantor berada pada posisi strategis, dimana hal ini menjadi keuntungan dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi dengan pihak lainnya (stakeholders).

1. Tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 24 ayat (7) yang menyatakan bahwa ***"Untuk Menunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi***

Dapat Membentuk Badan Penghubung Daerah Provinsi di Ibu Kota Negara. Sedangkan pada Pasal 70 menyatakan bahwa : ***“Badan Penghubung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Paling Banyak 3 (Tiga) Subbidang”***.

Tugas pokok Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat adalah ***“Menunjang korrdinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Pusat”***.

2. Fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat memiliki sejumlah fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penghubung;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penghubung;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang penghubung lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat, protokol dan pelayanan, hubungan antar lembaga dan promosi daerah;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penghubung;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pada tanggal 29 Desember 2017 dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat maka Unit Pelaksana Teknis Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah diintegrasikan sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat. Dengan dikeluarkannya Peraturan tersebut maka per Tahun 2017 Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah yang awalnya merupakan UPTD dari Dinas Pariwisata bergabung dengan Badan Penghubung.

3. Struktur Organisasi

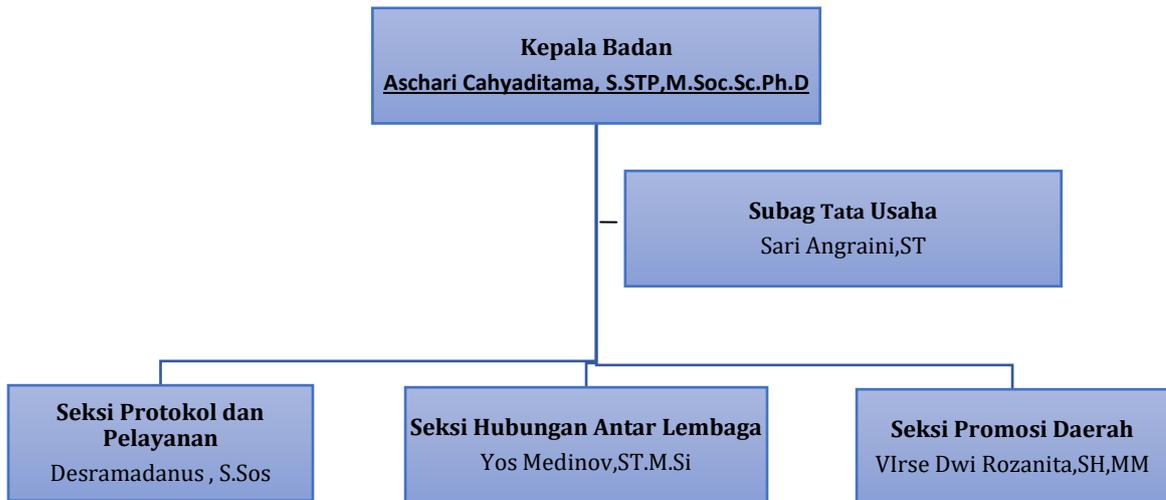
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang mengatur mengenai Badan Penghubung disebutkan bahwa “Kedudukan Badan Penghubung merupakan unsur penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat” dan Badan Penghubung dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Badan Penghubung sesuai Peraturan Gubernur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Hubungan Masyarakat, Protokol dan Pelayanan;
- d. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- e. Seksi Promosi Daerah

Bagan Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat disajikan sebagaimana di bawah ini:

**Bagan 1. Struktur Organisasi Badan Penghubung
Provinsi Sumatera Barat**



4. Sumber Daya

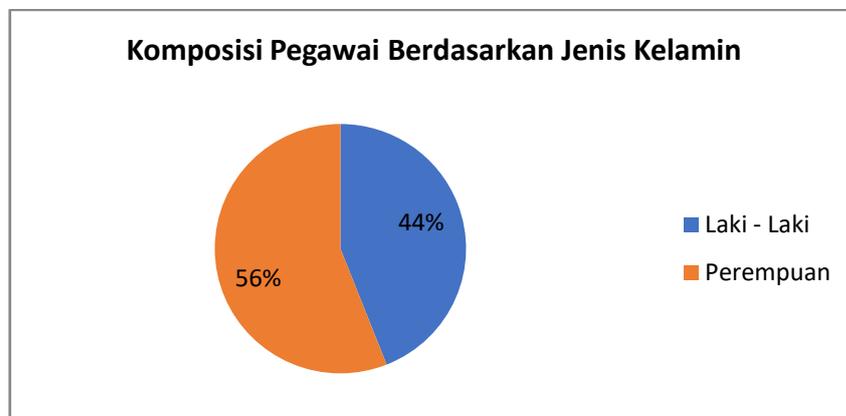
a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi organisasi yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian/Seksi pada tahun 2022 berjumlah 50 orang. Komposisi pegawai tersebut terdiri dari 49 orang Aparatur Sipil Negara dan 1 orang tenaga honorer/ Pegawai Tidak Tetap Daerah. Jika dilihat dari jenis kelamin, komposisi pegawai tersebut terdiri dari 22 orang laki-laki (44.00%) dan 28 orang perempuan (56.00%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang jauh antara jumlah pegawai laki-laki dan perempuan yang berarti dapat mendukung secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	22 orang
2.	Perempuan	28 orang
	Total	50 orang

Secara grafik dapat digambarkan pada Grafik 1.1.berikut :



Sumber: Daftar Pegawai Badan Penghubung 2022

Berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan formal, komposisi pegawai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat disajikan pada tabel 1.2 :

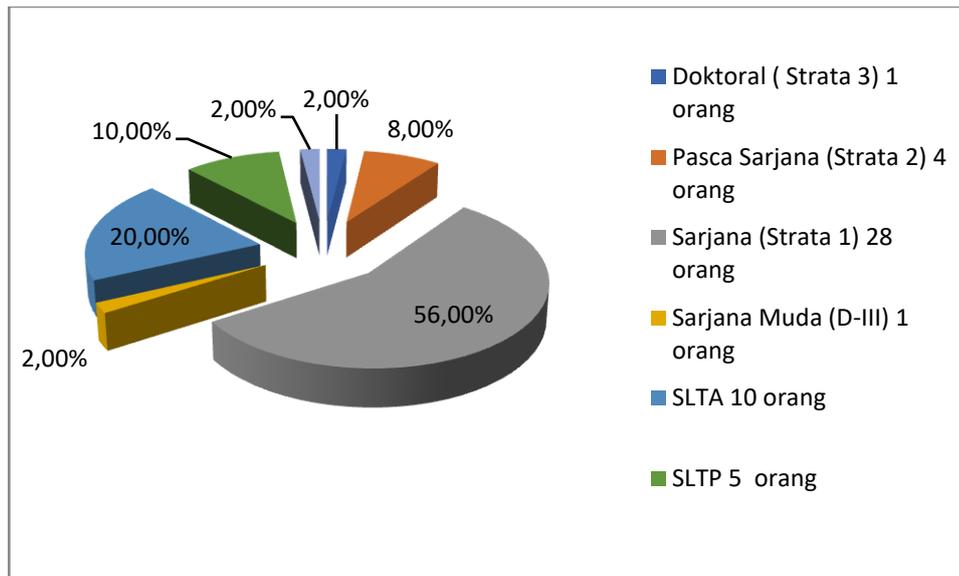
Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Doktoral (Strata 3)	1 orang	2 %
2.	Pasca Sarjana (Strata 2)	4 orang	8 %
3.	Sarjana (Strata 1)	28 orang	56 %
4.	Sarjana Muda (D-III)	1 orang	2 %
5.	SLTA	10 orang	20 %
6.	SLTP	5 orang	10 %
7.	SD	1 orang	2 %
	Jumlah	50 orang	100%

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat cukup memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi yang terdiri dari 56% pegawai sudah berpendidikan minimal sarjana, 2% Diploma, namun sebanyak 20% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sementara sisanya 10 % tamatan SLTP dan 2% SD harus mengikuti pendidikan non formal dan ujian penyetaraan ijazah untuk bisa naik pangkat ke golongan ruang selanjutnya. Sehingga dianggap penting adanya pengarahan pegawai di kelompok lulusan SLTA

sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 1.2 di bawah ini:

Grafik 1.2.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2022



Sumber: Daftar Pegawai Badan Penghubung 2022

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah:

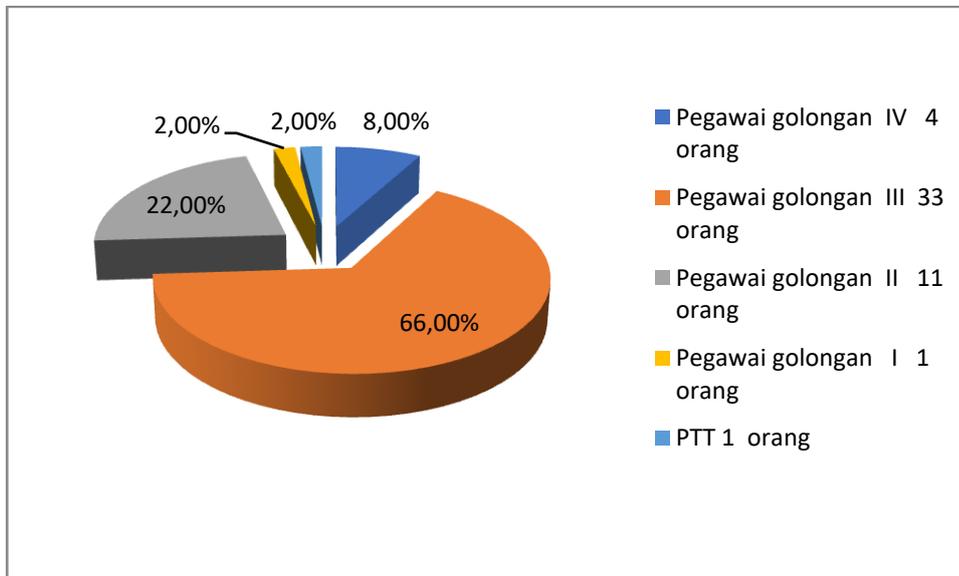
Tabel 1.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Pegawai golongan IV	4 orang	8 %
2.	Pegawai golongan III	33 orang	66 %
3.	Pegawai golongan II	11 orang	22%
4.	Pegawai golongan I	1 orang	2 %
5.	PTT	1 orang	2%
	Jumlah	50 orang	100%

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 58% pegawai Badan Penghubung adalah golongan III. Apabila dibandingkan dengan komposisi kualifikasi pendidikan pegawai, maka sebagian besar pegawai yang berpendidikan SLTA telah memasuki golongan III yang berarti

telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. Berikut komposisi pegawai Badan Penghubung per golongan ditunjukkan dalam grafik 1.3 berikut.

Grafik 1.3 komposisi pegawai Badan Penghubung per golongan



Sumber: Daftar Pegawai Badan Penghubung 2022

Komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4.

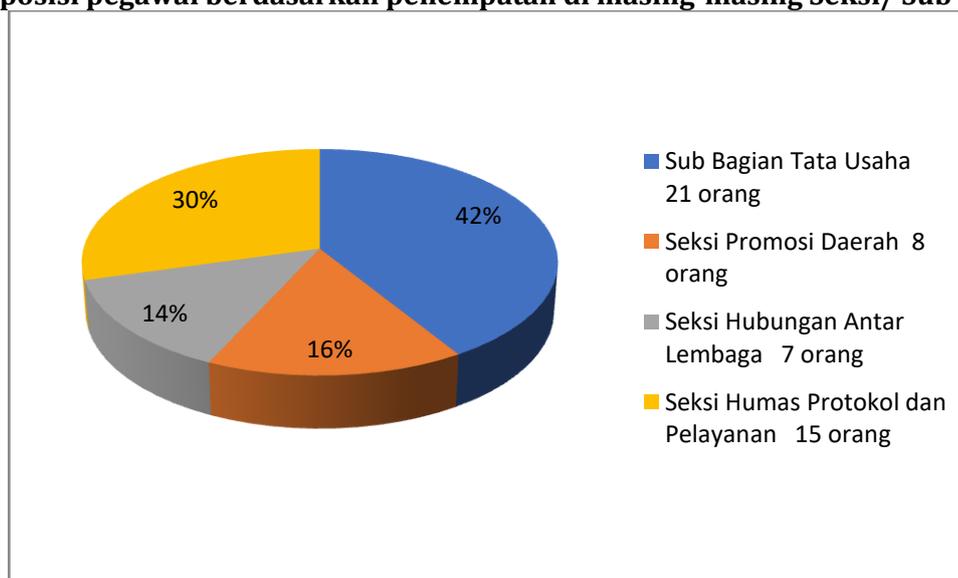
Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan di Masing-Masing Sub Bagian Tahun 2022

No.	Sub Bagian/Seksi	Jumlah	Persentase
1.	Sub Bagian Tata Usaha	21 orang	42 %
2.	Seksi Promosi Daerah	8 orang	16 %
3.	Seksi Hubungan Antar Lembaga	7 orang	14 %
4.	Seksi Humas Protokol dan Pelayanan	15 orang	30 %
	Jumlah	50 orang	100%

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 42 % pegawai berada di Sub Bagian Tata Usaha, sedangkan sebanyak 16 % jumlah pegawai yang ditempatkan pada Seksi Promosi Daerah yang mencakup juga Anjungan Sumatera Barat di Taman Mini Indonesia Indah. Selain

itu di Seksi Humas Protokol dan Pelayanan terdapat 15 orang pegawai atau sebanyak 30 %, dan penambahan pegawai dari tenaga *outsourcing* sebanyak 12 orang pada seksi ini untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan tamu dan Pimpinan Daerah serta peliputan pada Badan Penghubung. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing Seksi/ Sub Bagian dapat dilihat pada grafik 1.4 di bawah ini:

Grafik 1.4
Komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing Seksi/ Sub Bagian



Sumber: Daftar Pegawai Badan Penghubung 2022

Selain pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap Daerah, pada Badan Penghubung juga dipekerjakan pegawai dengan status *outsourcing* yang dibutuhkan dan ditempatkan pada masing-masing Sub Bagian Tata Usaha (tenagapenunjang administrasidan satpam pada Asrama Mahasiswa di Bogor), tenaga supir padaSeksi Humas Protokol dan Pelayanan serta Seksi Promosi Daerah (penempatan pada Anjungan Sumatera Barat TMII). Hal ini dikarenakan masih banyak dibutuhkan tenaga tambahan yang tidak dapat dipenuhi dari pegawai ASN. Rincian dari masing-masing tugas tenaga kontrak (*outsourcing*) tersebut adalah :

Tabel 1.5.
Rincian dan Jumlah Tenaga Outsourcing Tahun 2022

No.	Sub Bagian/Seksi	Jumlah
1.	Petugas Protokol	1 orang
2.	Petugas Lapangan di Bandara	1 orang
3.	Sopir	10 orang
4.	Tenaga Keamanan	7 orang
5.	Petugas Kebersihan	6 orang
6.	Tenaga Penunjang Administrasi	4 orang

Jumlah	30 orang
---------------	-----------------

Sumber: Daftar Pegawai Badan Penghubung 2022

b. Anggaran

Untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 didukung oleh Dana APBD Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran Pendapatan sebesar **Rp 50.000.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 50.720.000,- (101,44%)** dan Belanja Daerah sebesar **Rp. 17.381.528.782,-** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 16.787.751.237,** dan Belanja Modal sebesar **593.777.545,-.** Adapun realisasi Belanja pada akhir Tahun Anggaran 2022 untuk Belanja Operasi sebesar **Rp. 15.814.987.336,- (94,21%)** sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar **Rp 388.346.500,- (65,40%).** Jumlah total realisasi Belanja Daerah per31 Desember 2022 sebesar **Rp.16.203.333.836,-** atau mencapai **93.22%** dari total Anggaran Belanja.

c. Inventarisasi Asset

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tetap seperti tanah, bangunan, dan aktiva bergerak seperti kendaraan dinas, barang-barang inventaris dan fasilitas lainnya.

Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi cukup baik, dan sampaidengan Tahun 2022 telah diupayakan peningkatan sarana dan prasarana Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan melakukan pembelian/ pengadaan barang dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

Adapun data-data aset yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Aset Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

No	Aset Kantor	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
1	Kendaraan Roda Empat	16 Unit	Baik
2	Kendaraan Roda Dua	4 Unit	Baik
3	Inventaris Kantor	-	Baik

Sumber : Data Aset Badan Penghubung 2022

Tabel 1.7
Data Barang Inventaris Badan Penghubung
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Nama Barang	Volume (unit)	Keterangan (Kondisi %)
1	Komputer PC	42	95
2	Komputer (Laptop)	7	90
3	Mesin Tik Listrik	3	80
4	Mesin Tik Manual	1	40
5	Printer	16	90
6	Printer Dot Matrik	6	90
7	Printer Warna	7	80
8	Printer Foto	1	99
9	Camera	2	80
10	Handy cam	1	80
11	Handy talky	4	95
12	Mobil (Innova)	6	98
13	Toyota Rush	1	100
14	Mobil (Avanza)	1	70
15	Mobil (Altis)	1	80
16	Mobil (Camry)	4	90
17	Fortuner	1	99
18	Bus	2	97
19	Sepeda Motor	4	85
20	Foto Copy	2	95
21	Note Book	7	80
22	Mesin Penghancur Kertas	1	80
23	Mesin Absensi Finger Print	3	85
24	Mesin Potong Kertas	1	90
25	Lemari Es	3	95
26	Lemari Es dua pintu	2	95
27	Mesin Jet pump otomatis	2	97
28	Pompa air	2	80
29	Toren air	1	99
30	Dispenser	15	98
31	Komputer PC Kiosk	1	90
32	Peralatan Jaringan Komputer	1	95
33	Proyektor/Infocus	1	95
34	Telepon	3	94
35	Smart Phone	1	98
36	Faximile	3	99
37	Server Kiosk	1	90
38	Scanner	1	89
39	Ac	17	80
40	Kipas Angin	10	75
41	TV	3	85
42	CCTV	1	60

43	Pompa Air	2	90
44	Filling Kabinet	8	90
45	Meja belajar	64	80
46	Meja Administrasi	2	90
47	Meja Serba Guna	10	80
48	Lemari Pustaka	4	90
49	Korsi Hadap Administrasi	4	85
50	Kursi ruang tunggu	11	80
51	Kursi ruang tunggu dan kursi balkon	17	90
52	Meja computer	10	80
53	Tempat tidur	32	80
54	Tempat tidur besi bertingkat	49	85
55	Tempat tidur besi	2	85
56	Meja rapat	1	65
57	Meja makan lipat	4	80
58	Kursi Rapat	25	80
59	Kursi Tamu	98	80
60	Kursi Sofa Besar	1	75
61	Sofa Sice	2	80
62	Sofa Tamu	4	85
63	Matras	162	80
64	Lemari	164	65
65	Vacum Cleaner	1	90
66	Mesin Potong rumput	4	95
67	Alat mesin potong rumput	1	65
68	Cooling Fan	4	80
69	Lemari Dapur	1	50
70	Kompor Listrik	1	100
71	Kompor Gas	3	60
72	Microwave	1	90
73	Tabung Gas	3	80
74	Speaker	2	80
75	Wireless Toa	1	80
76	Wireless Portable	1	80
77	Mic Conference	1	80
78	Tangga lipat	2	100
79	Cermin kaca dinding	6	98
80	Meja pustaka	2	65
81	Fitrin Ukiran	16	70
82	Meja Staf	5	70
83	Meja Kerja Pejabat	3	80
84	Meja kerja	3	90
85	Kursi kerja kepala	1	90
86	Kursi kerja	1	60
87	Lemari Buku	10	80
88	Lemari Arsip	5	80
89	Meja kerja pejabat	3	97

Sumber : Data Aset Badan Penghubung Tahun 2022

E. ASPEK STRATEGIS

Aspek-aspek strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dilihat dalam beberapa poin berikut: Letak/ Posisi Di jalur strategis, Jl. Matraman Raya No. 19, akses yang cepat ke Kantor Kementerian/ Lembaga. Satu gedung dengan Hotel Balairung dan Bank Nagari Sarana dan Prasarana Kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan kantor, dan peralatan rumah tangga yang cukup memadai dalam melayani pejabat daerah yang bertugas di Jakarta dan pelaksanaan tupoksi lainnya. Promosi dan Publikasi melalui media, website <https://badanpenghubung.sumbarprov.go.id/>, media cetak dan elektronik Melalui RRI dan radio swasta lainnya, serta bekerjasama dengan TVRI dan TV Padang. Dilihat dari lokasi/ letak Badan berada pada jalur strategis, maka hal ini merupakan salah satu keuntungan/ nilai tambah dalam pelaksanaan tugas serta memperlancar koordinasi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*).

Aspek-aspek strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada tabel 1.8 berikut:

Tabel 1. 8 Aspek Strategis Badan Penghubung

No	Indikator	Aspek Strategis	Keterangan
1	Letak/ Posisi	Di jalur strategis, Jl. Matraman Raya No. 19, akses yang cepat ke Badan Kementerian/ Lembaga Pusat lainnya	Satu gedung dengan Hotel Balairung dan Bank Nagari
2	Sarana dan Prasarana	Kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan Badan, dan peralatan rumah tangga yang cukup memadai	Dalam melayani pejabat daerah yang bertugas di Jakarta dan pelaksanaan Tupoksi lainnya
3	Promosi dan Publikasi	Melalui media cetak dan elektronik serta website Badan Penghubung https://badanpenghubung.sumbarprov.go.id/	Melalui kerjasama dengan RRI, TVRI, TV Padang dan pihak media lain selain itu promosi dan publikasi kegiatan pimpinan daerah melalui website Badan Penghubung
4	Pelaksanaan	Lokasi kementerian/ lembaga yang	Percepatan dalam

	tugas pemerintahan	berpusat di Jakarta memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan tugas	proses administrasi urusan pemerintahan
5	Sosial Budaya	Komunikasi yang intens dengan Bakor/Paguyuban Perantau Minang yang ada/berpusat di Jakarta	Selalu ikut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan sosial budaya serta keagamaan dengan perantau minang

Gambaran Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan analisa SWOT yakni *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman/ tantangan) adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan yang dimiliki Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai tujuannya. Kekuatan merupakan modal dasar yang mesti dipelihara dan ditingkatkan diantaranya adalah:

- a. Kewenangan sebagai “duta” Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Dukungan Sumber Daya yang memadai (sumber daya manusia, sarana dan prasarana berupa gedung dan bangunan dengan lokasi strategis di pusat kota dengan perlengkapan dan peralatan Badan yang cukup memadai, anggaran dll);
- c. Besarnya potensi daerah yang dapat “dijual” dipromosikan kepada masyarakat serta investor baik dalam maupun luar negeri;
- d. Adanya Website BadanPenghubung yang merupakan jendela atau pusat informasi terpadu tentang potensi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat serta media publikasi kegiatan pimpinan daerah.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan adalah situasi kurang mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat/gagal mencapai sasarannya. Kelemahan yang bisa menjadi penghambat untuk mencapai tujuan organisasi antara lain:

- a. Status eselonering yang masih terbatas (eselon III) sehingga masih sulit dalam mengambil kebijakan yang bersifat teknis dan strategis;
- b. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi yang masih belum tepat;
- c. Kurang terjalin kerjasama yang optimal dengan pemerintah daerah (Kab/Kota) yang menyebabkan susahny mendapatkan data atau bahan-bahan promosi yang memadai tentang industri, kerajinan, kesenian dan sebagainya dari daerah secara tepat dan akurat sehingga mengganggu kualitas pelayanan informasi pada pihak yang membutuhkan.

3. Peluang (*Opportunities*)

Adanya perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan yang domestik, pluralistik dan desentralistik secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan perubahan-perubahan terjadi di pemerintah daerah maupun masyarakat.Keadaan tersebut memberikan peluang atau kesempatan bagi BadanPenghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta untuk mengembangkan segala upaya demi kemajuan daerah. Peluang atau kesempatan tersebut adalah:

- a. Kondisi letak yang strategis memudahkan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi, baik dengan Pemerintah Pusat, Kementerian dan Lembaga yang ada di Jakarta maupun dengan perantau Minang di Indonesia;
- b. Badan Penghubung memiliki koordinasi yang baik dengan Kementerian Luar Negeri karena telah terdaftar sebagai Admin Aepsilon Provinsi Sumatera Barat (Pengurusan Passport Dinas) dan pihak penghubung penanggungjawab pengambilan dokumen/surat- surat dinas di ULA (Unit Layanan Administrasi) di OTDA Kementerian Dalam Negeri.
- c. Banyaknya event promosi di Jakarta untuk pengenalan potensi daerah;
- d. Pemanfaatan teknologi informasi (IPTEK) dalam pelaksanaan tupoksi;
- e. Sumber Daya Perantau Minang yang cukup besar.

4. Ancaman/Tantangan (*Threats*)

Selain peluang atau kesempatan yang ada, terdapat pula ancaman yang dapat menyebabkan adanya kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan. Adapun ancaman yang dihadapi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- a. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja dan pelayanan Pemerintah Daerah
- b. Beberapa Kab/Kota juga memiliki perwakilan (Badan/perorangan) sehingga eksistensi Badan Penghubung menjadi berkurang
- c. Dinamika sosial politik

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksanaan tugas pemerintah Provinsi yang berkedudukan di Jakarta, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Untuk melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik secara internal maupun dari faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, antara lain:

- a. **Kurang berfungsinya sarana dan prasarana promosi kebudayaan dan pariwisata daerah Sumatera Barat.**

Fungsi penting lainnya yang diemban Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat adalah dalam pelayanan informasi daerah dan penyelenggaraan promosi daerah ditujukan untuk meningkatkan dukungan dan penyebaran informasi daerah bagi pihak eksternal di Jakarta dan sekitarnya, maupun sebaliknya pengumpulan informasi dari pihak eksternal yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan Provinsi Sumatera Barat yang dapat ditindaklanjuti atau didayagunakan oleh perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat adalah provinsi yang memiliki budaya yang sangat beragam dan ditunjang dengan banyak destinasi wisata yang menarik serta kuliner yang sangat banyak. Tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta salah satunya adalah mengenalkan keanekaragaman budaya dan pariwisata di Sumatera Barat. Sarana dan prasarana promosi mengenai Sumatera Barat ini dirasa masih kurang. Perlu adanya anggaran yang fokus mengenai promosi kebudayaan dan pariwisata agar Sumatera Barat bisa sejajar dengan provinsi lain.

b. Tidak meratanya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah di bidangnya.

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan serta keterampilan SDM aparatur pemerintah. Pelaksanaan pembangunan mengikut sertakan aparatur pemerintah bersama rakyat memegang peranan penting yaitu sebagai pelaksana dalam menjalankan pembangunan dan sebagai penggerak laju pembangunan. Aparatur pemerintah dituntut dalam menjalankan tugas dibidang masing-masing untuk lebih ulet, terampil, cekatan, berdedikasi tinggi dan menuju kepada suatu efisiensi untuk dapat mencapai tujuan nasional. Untuk itu, pengembangan kualitas SDM aparatur pemerintah di bidang perencanaan merupakan keharusan mutlak agar dokumen perencanaan dapat disusun lebih berkualitas.

c. Belum optimalnya peran lembaga dalam pelayanan koordinasi dan protokoler di Jakarta

Peran lembaga pemerintah dituntut untuk melakukan pelayanan dan protokoler bagi pejabat daerah Sumatera Barat di Jakarta seiring dengan perubahan dinamika sosial, politik, ekonomi, baik dari lingkungan nasional maupun global. Perubahan dilakukan sebagai upaya penyempurnaan yang lebih merupakan kebutuhan daripada sekedar keinginan. Namun demikian, meskipun berbagai upaya perbaikan dilakukan, permasalahan kelembagaan pemerintah masih saja muncul. Untuk itu, optimalisasi peran lembaga dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem pelayanan koordinasi dan protokoler. Optimalisasi peran lembaga merupakan salah satu faktor kunci bagi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Optimalisasi kelembagaan meliputi kemampuan institusi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berbasis kinerja serta meningkatkan dukungan data dan informasi secara lengkap, benar, variatif dan mutakhir.

Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Dituntut untuk memiliki standar pelayanan yang berkualitas.

2. Kapasitas SDM yang berkualitas dalam pelayanan.
3. Dituntut dalam pengelolaan informasi yang cepat, tepat dan memadai.

Disamping tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Lebih mudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat atau lembaga lainnya karena beralokasi di Jakarta.
2. Tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah.
3. Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan memadai.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Intansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| BAB I : PENDAHULUAN | : | a. Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia;
b. Aspek Strategis Organisasi
c. Permasalahan utama (<i>strategic issue</i>) yang sedang dihadapi organisasi. |
| BAB II: PERENCANAANKINERJA | : | memuat Ikhtisar/Perjanjian Kinerja Tahun 2022 |
| BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA | : | memuat Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran |
| BAB IV : PENUTUP | : | simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan |

kinerjanya

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditujukan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut telah ditetapkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI, UNGGUL DAN BERKELANJUTAN”,

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut kemudian dijabarkan di dalam 7 (Tujuh) misi pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Dari 7 misi tersebut di atas, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menunjang dalam pencapaian misi Provinsi Sumatera Barat khususnya pada misi yang ketujuh yaitu **“Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”**. Misi 7 ini memiliki 1 tujuan yaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dari 3 (tiga) sasaran tersebut, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat berada pada pada sasaran ke 1 dan 3 yaitu “terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel” dan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” . Melalui sasaran 1 dan 3 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tersebut, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu :

1. Terpenuhiya Pelayanan yang diberikan Badan Penghubung terhadap kebutuhan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya”, dengan 2 (dua) indikator tujuan yaitu :
 - a. Persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain
 - b. Jumlah promosi potensi daerah dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan.
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan 2 (dua) indikator Tujuan yaitu :
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja OPD
 - b. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi.

1. Tujuan dan Sasaran

Dalam penetapan tujuan dan sasaran Badan Penghubung juga perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

Tujuan

Tujuan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Pelayanan yang diberikan Badan Penghubung terhadap kebutuhan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya”, dengan 2 (dua) indikator tujuan yaitu :
 - a. Persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain
 - b. Jumlah promosi potensi daerah dan penyebarluasan informasi daerah yang dilaksanakan.
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan 2 (dua) indikator Tujuan yaitu :
 - c. Nilai akuntabilitas kinerja OPD
 - d. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi.

Sasaran

Adapun sasaran Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta periode 2021– 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah.

Indikator kinerja sasaran :

- 1) Persentase Aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani.
 - 2) Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.
2. Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.

Indikator kinerja sasaran :

- 1) Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan.
- 2) Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan
3. Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat.

Indikator Kinerja Sasaran :

- 1) Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat.
 - 2) Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera.
 - 3) Jumlah pelaksanaan pemberian informasi potensi daerah Sumatera Barat.
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Indikator kinerja sasaran :

- 1). Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD yang terdiri atas 3 (tiga) sasaran yaitu :
 - a. Meningkatnya kualitas perencanaan organisasi
 - b. Meningkatnya kualitas pelaporan organisasi
 - c. Meningkatkan pengawasan internal organisasi
5. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

Indikator kinerja sasaran :

- 1) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Pada tabel berikut dapat dilihat kesesuaian program Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

Tabel 2.1
Kesesuaian Program Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Dengan RPJMD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026

Misi : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS

TUJUAN KEPALA DAERAH 2021-2026	SASARAN 2021-2026	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
1. Meningkatkan kinerja birokrasi 2. Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas koordinasi dalam memfasilitasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing dan Pemerintah Provinsi lainnya serta pemangku kepentingan lainnya	Fasilitasi aktivitas/kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemangku kepentingan lainnya	Program Pelayanan Penghubung	
	Meningkatnya kualitas fasilitasi promosi potensi daerah dan penyebaran informasi daerah diluar Sumatera Barat	Fasilitasi promosi potensi pembangunan daerah kepada pemangku kepentingan		
	Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan perantau	Penyusunan regulasi dalam rangka pemberdayaan potensi rantau dalam pembangunan daerah		
	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat		
	Meningkatnya fasilitasi pelayanan perangkat daerah provinsi terhadap masyarakat	Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan penghubung		

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54 Tahun 2014 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menyusun perjanjian kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh Gubernur. Penetapan Kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Penetapan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022 mengacu kepada Renstra SKPD Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang diturunkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 sebagai dasar untuk mengukur kinerja Badan Penghubung untuk Tahun 2022. Pada Laporan Kinerja Badan Penghubung Tahun 2022 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Mempertimbangkan sumberdaya, telah ditetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah.	1. Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani. 2. Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100% 100 %
2.	Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda	1. Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	12 kali

	Sumatera Barat di perantauan.	2. Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	2 kali
3.	Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat	1. Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat 2. Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	12 kali 8 kali
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	1. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik
No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Penghubung	Rp. 3.292.526.800,-	APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 9.745.043.716,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 13.037.570.516,-	

Pada bulan November tahun 2022, terjadi perubahan APBD pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sehingga Perjanjian Kinerja diubah sesuai pagu APBD Perubahan sekaligus menyesuaikan target kinerja. Namun, untuk sasaran dan indikator kinerja tidak mengalami perubahan. Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga	1. Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.	100%

	Non Pemerintah.	2. Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100 %
2.	Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.	1. Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan 2. Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	12 kali 3 kali
3.	Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat	1. Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat 2. Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	6 kali 2 kali
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	1. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Penghubung	Rp. 4.273.558.498,-	APBD-P
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 13.107.970.284,-	APBD-P
	JUMLAH	Rp. 17.381.528.782,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Hakikat dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumberdaya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*) maupun dampak. Pendekatan ini sejalan dengan salah satu pilar prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian peningkatan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh OPD. Laporan kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Menindaklanjuti arahan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, pengukuran kinerja pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	KUALIFIKASI NILAI	PREDIKAT
1.	> 100%	Memuaskan
2.	85% - 100%	Sangat Baik
3.	69% - 84%	Baik
4.	53% - 68%	Cukup
5.	< 53 %	Gagal

Analisis pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2022 dilakukan terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 yang diturunkan pada Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas. OPD dapat dikatakan berhasil apabila indikator-indikator yang ditetapkan telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran sehingga dapat menjadi pembenaran logis atas pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2022 merupakan kinerja tahun kedua Renstra Badan Penghubung Tahun 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar **104,03% (Memuaskan)** yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah.	a. Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.	100%	100%	100%
		b. Persentase Aktifitas Pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran 1					100,00%
2	Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan.	a. Jumlah Aktifitas Koordinasi Dengan Perantau yang dilaksanakan.	12 kali	14 kali	116,67%
		b. Jumlah Pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan.	3 kali	3 kali	100,00%
Rata-Rata Capaian Sasaran 2					108,00%
3	Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat.	a. Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat	6 kali	7 kali	116,67%
		b. Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	2 kali	2 kali	100,00%
Rata-Rata Capaian Sasaran 3					108,00%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B (66.00)	B (62.82)	95,18%
Rata-Rata Capaian Sasaran 4					95,18%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (78.20)	Baik (85,20%)	108,95%
Rata-Rata Capaian Sasaran 5					108,95%
Rata-Rata Capaian Sasaran 1,2,3,4 & 5					104,03%

Sumber: Badan Penghubung Prov.Sumatera Barat

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran pada tabel 3.2 diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja 5 sasaran pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di tahun 2022 mencapai **104,03** dengan kategori **Memuaskan**. Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis yang terdapat pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja 3 (tiga) indikator adalah **Memuaskan** dan 5 (lima) lainnya dengan capaian **Sangat Baik**.

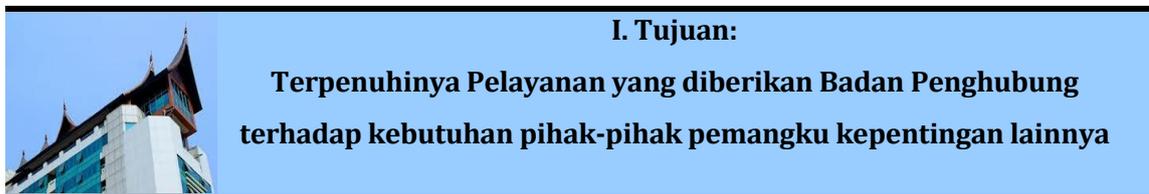
C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja (*outcome*) sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian

target indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh.

Capaian sasaran strategis diperoleh dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, juga dilakukan analisis dengan membandingkan hasil capaian indikator kinerja utama dengan tahun sebelumnya dalam hal ini tahun 2022 dan juga mengaitkan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut:



Tujuan ini dicapai dengan indikator kinerja tujuan sebagai berikut:

1. Persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain (%)

Capaian indikator ini dihitung dengan cara membandingkan antara Realisasi pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain dengan Target pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain dalam persentase.

2. Jumlah Promosi Potensi daerah dan penyebarluasan informasi daerah yang dilaksanakan

Capaian indikator ini dihitung dengan membandingkan antara Realisasi pelaksanaan promosi potensi dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan dengan Target pelaksanaan promosi potensi dan penyebaran informasi daerah dalam persentase.

Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama Tujuan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Indikator Tujuan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain	100%	100%	100%	Sangat Baik
2	Jumlah Promosi Potensi daerah dan penyebarluasan informasi daerah yang dilaksanakan	12 kali	9 kali	75%	Baik
Rata-rata Capaian				87,50%	Sangat Baik

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari table 3.3 diatas dapat dilihat rata-rata pencapaian indikator kinerja utama tujuan tercapai sebanyak **87,50%** dengan kategori **Sangat Baik**. Formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian indikator tujuan adalah sebagai berikut:

1. Persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain (%)

Formulasi penghitungan Capaian kinerja indikator tujuan ini pada tahun 2022 adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

Dari perhitungan diatas dapat disampaikan bahwa persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain mencapai 100 % dengan kategori Sangat Baik yang artinya seluruh kegiatan, urusan, kepentingan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat /Asing maupun sebaliknya, organisasi Masyarakat Minang baik perantau maupun Mahasiswa Minang pada Asrama yang dikelola dapat dilayani dan difasilitasi dengan baik oleh Badan Penghubung.

2. Jumlah Promosi Potensi daerah dan penyebarluasan informasi daerah yang dilaksanakan

Formulasi penghitungan Capaian kinerja indikator tujuan ini pada tahun 2022 adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

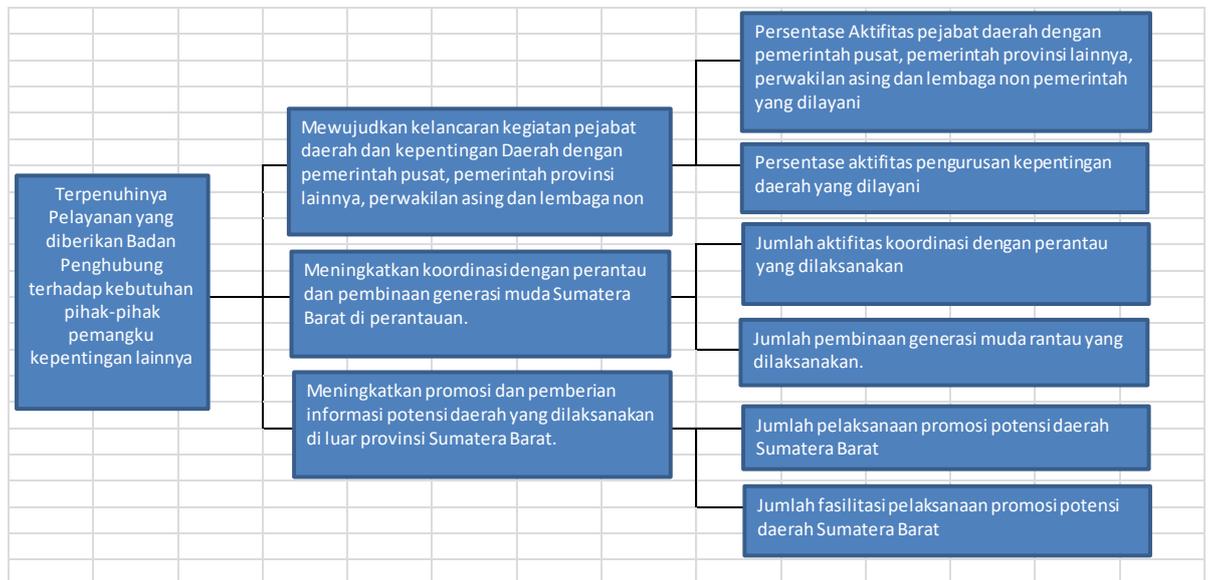
$$75\% = \frac{9 \text{ kali}}{12 \text{ kali}} \times 100\%$$

Dari perhitungan diatas dapat disampaikan bahwa pada Tahun 2022 Badan Penghubung telah melaksanakan promosi potensi daerah serta penyebarluasan informasi daerah dengan baik sebanyak 9 kali kegiatan yang dilaksanakan secara langsung ataupun bersifat fasilitasi promosi kesenian daerah dari Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

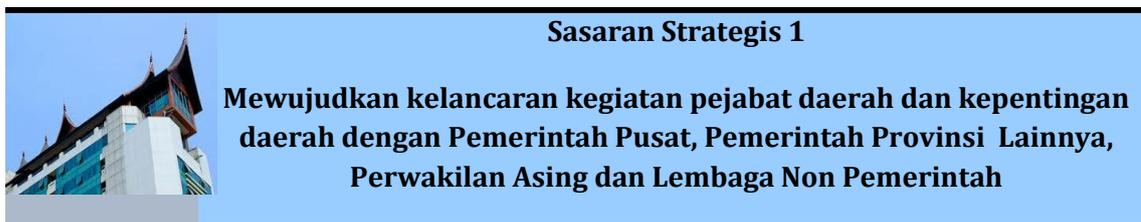
Tujuan Terpenuhinya Pelayanan yang diberikan Badan Penghubung terhadap kebutuhan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya dicapai dengan menetapkan 3 Sasaran Strategis dengan 6 Indikator Kinerja. Tujuan, Sasaran dan Indikator dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator



Penjelasan rinci masing-masing Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Badan Penghubung yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:



Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat selaku OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jakarta bertugas untuk menunjang kelancaran koordinasi pelaksanaan urusan pemerintah dan pembangunan antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Pusat, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah yang berada di luar Provinsi Sumatera Barat dan pengurusan administrasi kepentingannya.

Untuk mengetahui pencapaian sasaran strategis pertama ini, ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.
2. Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.

Dimana dalam upaya pencapaian sasarandilaksanakan dengan Program Pelayanan Penghubung.

Capaian kinerja Badan Penghubung dalam rangka melaksanakan pelayanandemi terwujudnya kelancaran kegiatan Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Realisasi Sasaran Strategis 1: Terwujudnya kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN 2022	Kategori
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.	100%	100%	100%	Sangat Baik

2.	Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100%	100%	100%	Sangat Baik
----	---	------	------	------	-------------

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

1. Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani

1.1. Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini

Realisasi Kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani pada tahun ini adalah sebagaimana tertera dalam table berikut:

Tabel 3.5

Pencapaian Kinerja Indikator

Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN 2022	Kategori
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.	100%	100%	100%	Sangat Baik

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran pada tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja indikator pelaksanaan pelayanan fasilitasi aktivitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani **Sangat Baik (realisasi 100%)** sesuai dengan target yang ditetapkan. Ini berarti setiap permintaan untuk pelayanan kegiatan Pimpinan Daerah di Jakarta ataupun luar Sumatera Barat dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Bentuk pelayanan dan fasilitasi yang diberikan oleh Badan Penghubung dalam melancarkan kegiatan Pimpinan Daerah selama tahun 2022 dapat dijabarkan yaitu:

a. Jumlah Pejabat Daerah/Tamu Yang Dilayani

Pengukuran kinerja indikator jumlah pelaksanaan pelayanan fasilitas pejabat daerah melalui kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung dengan Sub Kegiatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung yang terdiri dari pelayanan pimpinan daerah di Jakarta dan luar Sumatera Barat mulai dari fasilitas mobilisasi dan penugasan protokol untuk mendampingi dan melayani baik di Jakarta maupun luar Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan pimpinan daerah ada yang bersifat rapat koordinasi, kunjungan kerja, penerimaan penghargaan, undangan, penyerahan bantuan bencana alam dan pertemuan dengan tokoh, perantau, mahasiswa Minang yang berada di luar Provinsi Sumatera Barat.

Dari pelaksanaan kegiatan dapat dirinci kunjungan ke Jakarta dan luar Jakarta antara lain:

- Rapat-rapat koordinasi di Jakarta sebanyak 70 kali kegiatan
- Penerimaan penghargaan di Jakarta sebanyak 6 kali kegiatan
- Pertemuan dengan tokoh tokoh masyarakat minang di Jakarta 50 kali kegiatan
- Kegiatan menghadiri rapat-rapat koordinasi kegiatan di Luar Jakarta yaitu rapat-rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja, Penerimaan Penghargaan, Penyerahan Bantuan Bencana Alam, event-event Nasional, Petemuan dengan tokoh masyarakat Minang, mahasiswa daerah yang dikunjungi antara lain, Kota Medan, Batam, Kota Jambi, Kota Palembang, Bandar Lampung, Kota Yogyakarta, Bali, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Makasar dan Cianjur.
- Pelayanan pimpinan daerah di luar Sumatera Barat sebanyak 238 kali kegiatan.

b. Jumlah Konsultasi Pemerintah Daerah Yang Difasilitasi

Sehubungan dengan fungsi Badan Penghubung dalam hal fasilitasi bidang penghubung lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 50 kali fasilitasi konsultasi pemerintah daerah yang diantaranya terdiri dari :

- Fasilitasi pertemuan pimpinan dengan Kementrian terkait tentang Koordinasi Rencana Pembangunan Fly Over Sitingau Laut.
- Rapat koordinasi dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan mengundang antara lain :
 - a. Dirjen Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri
 - b. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementrian PPN/Bappenas RI

- c. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas RI
 - d. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas RI
 - e. Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat RI
 - f. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI
 - g. Dirjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan Kementerian KLHK RI
 - h. Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI
 - i. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
 - j. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III RI
 - k. Kepala Balai KSDA Sumatera Barat
- Fasilitasi konsultasi Pemerintah Daerah ke Kementerian/Lembaga Tinggi Negara
 - Fasilitasi konsultasi Pemerintah Daerah ke Lembaga Non Pemerintahan (Swasta/Kedutaan Besar Negara Lain)
 - Fasilitasi konsultasi Pemerintah Daerah ke Pemerintahan Daerah Lain
 - Fasilitasi konsultasi Pemerintah Daerah ke Organisasi Perantau, dan Mahasiswa diluar Provinsi Sumatera Barat

c. Jumlah Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah yang dilaksanakan

Dalam melaksanakan pelayanan kehumasan pimpinan daerah dan perangkat nya dalam pelaksanaan tugas diluar provinsi Sumatera Barat, Badan Penghubung melaksanakan publikasi kegiatan pimpinan daerah.Pada Tahun 2022, kegiatan publikasi media terlaksana sebanyak **96** (sembilan puluh enam)kali. Publikasi kegiatan pimpinan daerah ini di *upload* pada portal media resmi Sumatera Barat yaitu <https://www.sumbarprov.go.id/> dan *website* Badan Penghubung <https://badanpenghubung.sumbarprov.go.id/>.

Capaian kinerja indikator ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan pelayanan kegiatan pimpinan daerah :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$100\% = \frac{364 + 50 + 96 \text{ kali}}{510 \text{ kali}} \times 100\%$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Persentase Aktifitas Pejabat daerah dengan pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintahan yang dilayani dari Sasaran Strategis Pertama mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun karena semua kegiatan pimpinan daerah dapat

difasilitasi dan dilaksanakan pelayanan dengan baik.

1.2.Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya

Realisasi Kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani pada tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani Tahun 2021 dan 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2021 (n-1)
1	2	3	4	5	5
1.	Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.	100%	100%	100%	100%

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Jika dibandingkan dengan Capaian tahun sebelumnya yang juga memenuhi target 100%, pada tahun 2022terdapat peningkatan intensitas kegiatan pelayanan Pimpinan Daerah karena membaiknya kondisi pandemi di Indonesia yang tidak lagi memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, seiringan dengan padatnya jadwal dan undangan pimpinan Daerah yang harus dilayani dan difasilitasi baik yang dilaksanakan di Jakarta ataupun luar Provinsi Sumatera Barat.Hal ini menambah permintaan intensitas pelayanan sehingga harus dibarengi dengan penambahan jumlah tenaga pelayanan pimpinan daerah (protokol dan sopir) yang *capable* sehingga memadai untuk mengimbangi padatnya jadwal pimpinan yang harus dilayani.

1.3 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan target jangka Menengah

Realisasi Kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani

pada tahun ini dengan target jangka menengah adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani sampai Akhir Periode Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA/RPJMD	REALISASI TAHUN 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Persentase aktifitas pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang dilayani.	100%	100%	0%

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel 3.7 diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Indikator Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani sampai Akhir Periode Renstra telah sama dengan target akhir Renstra/ RPJMD hal ini dikarenakan Badan Penghubung selaku OPD Penunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat dengan salah satu tugas pokoknya adalah pelayanan dan fasilitasi kegiatan pimpinan daerah di luar Sumatera Barat.

1.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani pada tahun ini sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

1.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang

Dilayani tahun 2022 terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan awal tahun dengan kategori Sangat Baik dengan artian karena semua kegiatan pimpinan daerah dapat difasilitasi dan dilaksanakan dengan baik. Faktor pendukung dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- a). Peningkatan intensitas kegiatan pelayanan Pimpinan Daerah karena membaiknya kondisi pandemi di Indonesia yang tidak lagi memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, seiringan dengan padatnya jadwal dan undangan pimpinan Daerah yang harus dilayani dan difasilitasi baik yang dilaksanakan di Jakarta ataupun luar Provinsi Sumatera Barat.
- b). Penambahan jumlah tenaga pelayanan pimpinan daerah (protokol dan sopir) yang *capable* dari tenaga *outsourcing* sehingga memadai untuk mengimbangi padatnya jadwal pimpinan yang harus dilayani.

1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian indikator kinerja ini Badan Penghubung juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu efisiensi adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Dimana dalam upaya pencapaian sasaran dilaksanakan dengan Program Pelayanan Penghubung, Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung. Realisasi penggunaan anggaran Sub Kegiatan untuk pendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Sisa
Persentase Aktifitas Pejabat daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah yang dilayani	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	61.250.000	53.570.000	87,46%	7.680.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung	2.592.796.598,00	2.475.414.947,00	95,47%	117.381.651,00

Sumber: Data Realisasi Badan Penghubung 2022

Dari tabel 3.8 dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan Anggaran yang telah dilakukan untuk pencapaian target indikator masing-masing 12,54% dan sebesar 4,53%. Efisiensi yang dilakukan antara lain:

- ✓ Efisiensi penggunaan Anggaran Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung yang memaksimalkan peliputan dan publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah pada website portal media resmi Sumatera Barat yaitu <https://www.sumbarprov.go.id/> dan website Badan Penghubung <https://badanpenghubung.sumbarprov.go.id/>
- ✓ Efisiensi Belanja Jasa Pengamanan dalam hal ini Patwal kegiatan pimpinan serta Belanja Bahan Bakar dan Pelumas dengan cara pengaturan jadwal pelayanan kegiatan pimpinan daerah pada saat di Jakarta/luar Sumatera Barat.

Pencapaian indikator kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani didukung oleh Program Pelayanan Penghubung, Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat serta Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung yang secara keseluruhannya pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan ini tercapai dengan baik (Realisasi keuangan masing-masing 87,46% dan 95,47% dan Fisik 100%), hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan Badan Penghubung	12bulan	12 bulan	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase fasilitasi Pelayanan yang dilaksanakan Badan penghubung	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Realisasi Fisik/Keuangan Kegiatan Badan Penghubung 2022

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Pertama dari

Sasaran Strategis Pertama mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun karena semua kegiatan pimpinan daerah dapat difasilitasi dan dilaksanakan dengan baik.

2. Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah Yang Dilayani

2.1. Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini

Realisasi Kinerja Persentase Aktifitas Pejabat Daerah Dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Perwakilan Asing, Lembaga Non Pemerintah yang Dilayani pada tahun ini adalah sebagaimana tertera dalam table berikut:

Tabel 3.10
Persentase Capaian Indikator Kinerja Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang Dilayani

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN 2022	Kategori
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang Dilayani	100%	100%	100%	Sangat Baik

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

Dalam lingkup penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penghubung serta fasilitasi bidang penghubung lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kotasesuai fungsi Badan Penghubung, berdasarkan tabel 3.10 di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja indikator Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah Yang Dilayani tergolong **Sangat Baik (Realisasi 100%)** sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk mencapai sasaran indikator ini dilaksanakan Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka pengurusan kepentingan daerah di Pusat. Bentuk pengurusan kepentingan daerah yang diberikan oleh Badan Penghubung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2022 dapat dijabarkan yaitu:

a. Jumlah Surat Izin Yang Difasilitasi

Untuk mencapai sasaran indikator ini dilaksanakan pada Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka pengurusan kepentingan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat di Pusat. Tugas rutin yang dilaksanakan adalah pengurusan izin keluar negeri bagi pejabat Pemerintah Sumatera Barat. Pada Tahun 2022 Badan Penghubung telah melakukan tugas fasilitasi pengurusan surat izin luar negeri sebanyak **59** kali yang terdiri dari:

- Pembahasan Peraturan Gubernur sebanyak 28 surat
- Izin Perjalanan ke luar negeri sebanyak 31 surat.

b. Jumlah Keputusan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah yang diurus

Badan Penghubung melalui Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat juga melakukan fasilitasi pengurusan Surat Keputusan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada Tahun 2022 Badan Penghubung telah berhasil membantu fasilitasi pengurusan 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Surat Keputusan (SK) Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah. Jumlah SK yang diurus dihitung berdasarkan Surat Keputusan yang diambil dan diserahkan OPD terkait. Realisasi pengurusan Surat Keputusan ini antara lain Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, Surat Keputusan Mutasi dan Surat Keputusan Pindah Tugas ASN dari dan keluar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Semua Surat Keputusan dapat dibantu pengurusannya dan berhasil difasilitasi, dengan demikian dapat dilihat Capaian Kinerja Indikator sasaran strategis ini:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$100\% = \frac{59 \text{ Surat Izin} + 271 \text{ Surat Keputusan}}{59 \text{ Surat Izin} + 271 \text{ Surat Keputusan}} \times 100\%$$

Dari Capaian Kinerja tersebut dapat dilihat bahwa indikator kinerja kedua dari Sasaran Strategis Pertama mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun karena semua pengurusan Surat Keputusan Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah dapat difasilitasi dan berhasil dilaksanakan dengan baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis Pertama Badan Penghubung mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun karena semua kegiatan Pejabat Daerah dan pengurusan administrasi kepentingan daerah dengan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, perwakilan asing dan Lembaga Non Pemerintah dapat difasilitasi dan berhasil dilaksanakan dengan baik dengan Realisasi Capaian **100%(Sangat Baik)**.

2.2 Perbandingan antara realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

Realisasi Kinerja Persentase Aktifitas Pengurusan kepentingan daerah yang Dilayani pada tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang Dilayani Tahun 2021 dan 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2021 (n-1)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100%	100%	100%	100%

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

Dibandingkan realisasi tahun 2021 (total 60 kali pengurusan Izin dan Surat Kepentingan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat) terjadi peningkatan intensitas jumlah pengurusan surat keputusan dan izin dari Pemerintah Daerah menjadi total 330 kali di tahun 2022 dikarenakan telah membaiknya situasi pandemi di Indonesia sehingga tidak dilakukan pembatasan perjalanan ataupun kegiatan masyarakat lagi. Walaupun secara persentase tetap, yang artinya semua permintaan pengurusan kepentingan daerah yaitu izin dan kepentingan daerah dapat dilayani dengan baik.

2.3 Perbandingan antara realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Kinerja Persentase Aktifitas Pengurusan kepentingan daerah yang Dilayani pada tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Pengurusan Kepentingan Daerah yang Dilayani sampai Akhir Periode Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA/RPJMD	REALISASI TAHUN 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100%	100%	0%

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel 3.12 diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Indikator Persentase Aktifitas Pengurusan kepentingan daerah yang Dilayani sampai Akhir Periode Renstra telah sama dengan target akhir Renstra/ RPJMD hal ini dikarenakan Badan Penghubung selaku OPD Penunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat dengan salah satu fungsinya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penghubung yakni pengurusan setiap kepentingan daerah pada pemerintah pusat.

2.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait Persentase Aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang Dilayani pada tahun ini sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

2.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Persentase Aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang Dilayani tahun 2022 terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan awal tahun dengan kategori Sangat Baik dengan artian karena semua permintaan pengurusan kepentingan daerah, baik itu surat izin ataupun surat keputusan pemerintah daerah ke pemerintah pusat dapat diselesaikan dengan baik. Faktor pendukung dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- a). Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri serta pada Kementrian Sekretariat Negara dalam

hal pengurusan izin perjalanan dinas dan cuti pejabat daerah ke luar negeri termasuk pasport dan visa ke luar negeri bagi para pejabat/pimpinan daerah di Sumatera Barat.

- b). Koordinasi yang baik dengan Kementerian dan Lembaga di Pemerintah Pusat dalam hal pengurusan Surat Keputusan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat

2.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian indikator kinerja ini Badan Penghubung juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu efisiensi adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Dimana dalam upaya pencapaian sasaran dilaksanakan dengan Program Pelayanan Penghubung, Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat. Realisasi penggunaan anggaran Sub Kegiatan untuk pendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Sisa
Persentase Aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	655.087.300,00	651.962.837,00	99,52%	3.124.463,00

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2022

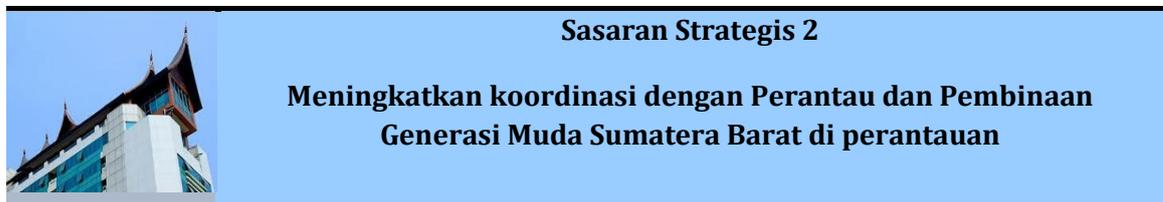
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan Sumber daya anggaran telah dimaksimalkan untuk pencapaian target kinerja indikator ini. Pencapaian indikator kinerja persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani didukung oleh satu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14

Realisasi Capaian Kinerja Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Kementrian/Lembaga Asing dan Pemerintah Provinsi lainnya, Masyarakat serta Pemangku Kepentingan Lainnya	6 kali	6 kali	100%
		Rapat Koordinasi Badan Penghubung Seindonesia	1 kali	1 kali	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat Capaian Kinerja Persentase aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani tercapai sesuai target sebanyak 100% yang didukung oleh anggaran serta terlaksananya seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.



Sumber Daya Perantau Minang merupakan potensi kekuatan yang dimiliki Provinsi untuk mengembangkan potensi daerah Sumatera Barat. Oleh karena itu Badan Penghubung terus menjalin komunikasi yang intens dengan Bakor/Paguyuban Perantau Minang yang ada/ berpusat di Jakarta atau luar Provinsi lainnya, selain itu Badan Penghubung juga intens membina dan menjalin komunikasi dengan perantau yang berasal dari Generasi muda Minang. Sasaran Strategis ini dicapai dengan dua indikator, yaitu:

Tabel 3.15

Realisasi Kinerja Meningkatkan Koordinasi dengan Perantau dan Pembinaan Generasi Muda Sumatera Barat di Perantauan pada Tahun 2022

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2022	Kategori
		2022			
		Target	Realisasi	%	
1	Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	12 kali	14 kali	116,67 %	Memuaskan
2	Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	100 %	Sangat Baik

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

Untuk penjelasan lebih terperinci capaian indikator kinerja masing-masing sasaran Strategis “Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan” dijelaskan lebih lanjut pada bab ini:

1. Jumlah Aktifitas Koordinasi dengan Perantau yang dilaksanakan

1.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Pencapaian Kinerja Indikator
Jumlah Aktifitas Koordinasi dengan Perantau yang dilaksanakan

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2022	Kategori
		2022			
		Target	Realisasi	%	
1	Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	12 kali	14 kali	116,67 %	Memuaskan

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama Jumlah Aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan tahun 2022 mencapai 116,67% dari target yang ditetapkan dan termasuk kategori Memuaskan. Pada tahun 2022 lebih banyak kegiatan koordinasi yang terlaksana, disebabkan mulainya dilonggarkan aturan PPKM sehingga kegiatan mulai bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana semula. Badan Penghubung juga terus melakukankoordinasi yang baik dengan lembaga, Ikatan Keluarga Minang baik di Jabodetabek maupun luar Jabodetabek terkait dalam pelaksanaan kegiatan juga merupakan faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Jumlah aktivitas koordinasi dengan organisasi masyarakat perantau yang dilibatkan dihitung berdasarkan jumlah kegiatan yang melibatkan organisasi masyarakat di rantau. Kegiatan yang dilaksanakan berupa fasilitasi dan mengikuti acara yang dilaksanakan oleh Organisasi masyarakat Minang di perantauan, yaitu antara lain :

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| a. Acara Sulit Air Sepakat | 2 kali |
| b. Acara Solok Saiyo Sakato | 1 kali |
| c. Acara Keluarga Mahasiwa Minang | 1 kali |
| d. Acara Urang Awak Ojek Online | 1 kali |
| e. Acara IKM (dari berbagai provinsi) | 9 kali |

Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk non formal, diantaranya dalam bentuk fasilitasi dan koordinasi dengan Organisasi perantau yang berada di Luar Sumatera Barat, seperti Fasilitasi Pertemuan Pimpinan Daerah dengan IKM yang berada di Semarang, Riau, Yogya dan daerah-daerah lainnya. Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan selama tahun 2022 adalah sebanyak 14 kali.



Menghadiri Acara Urang Awak Ojek Online di BSD, Tangerang Selatan



Penyerahan Sertifikat Tanah untuk hibah pembangunan Asrama Mahasiswa dari Warga Minang di Kota Semarang, November 2022

Capaian kinerja indikator ini dapat dilihat dari jumlah pelaksanaan aktivitas koordinasi dengan perantau :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$116,67\% = \frac{14 \text{ kali}}{12 \text{ kali}} \times 100\%$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indikator Pertama pada Sasaran Strategis Kedua Badan Penghubung melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun karena pelaksanaan aktifitas Koordinasi dengan perantau tercapai sebanyak **116,67%** dengan kategori “**Memuaskan**”

1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Jumlah Aktifitas korrdinasi dengan perantau yang dilaksanakan
Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2021
		2022			
		Target	Realisasi	%	%
1	Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	12 kali	14 kali	116,67 %	100 %

Sumber: LKjIP Badan Penghubung 2021 dan Hasil Analisa

Dibandingkan tahun sebelumnya di 2021, pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat dikatakan lebih banyak terlaksana, disebabkan mulainya dilonggarkan aturan PPKM sehingga kegiatan mulai bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana semula.

1.3 Perbandingan antara realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Kinerja Persentase Aktifitas Koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakansampai Akhir Periode Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA/RPJMD	REALISASI TAHUN 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	12	14	116,67%

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel 3.16 diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Indikator Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakansampai Akhir Periode Renstra telah melebihi target akhir Renstra/ RPJMD hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat dikatakan lebih banyak terlaksana, disebabkan mulainya dilonggarkan aturan PPKM sehingga kegiatan mulai bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana semula. Badan Penghubung juga terus melakukan koordinasi yang baik dengan lembaga maupun organisasi perantau Minang terkait dalam pelaksanaan kegiatan juga merupakan faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

1.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan pada tahun ini sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

1.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau tahun 2022 terealisasi sebesar 116,67% dari target yang ditetapkan awal tahun dengan

kategori Memuaskan, hal ini disebabkan faktor pendukung dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- a). Telah longgarnya aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat karena COVID -19 di tahun 2022 sehingga memungkinkan bagi Badan Penghubung melaksanakan kegiatan koordinasi dengan perantau ataupun sebaliknya menghadiri acara yang diadakan oleh organisasi perantau Minang di luar Sumatera Barat.
- b). Koordinasi yang baik dengan Organisasi perantau Minang dalam rangka mengumpulkan database untuk perantau Minang (e-Rantau)

1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian indikator kinerja ini Badan Penghubung juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu efisiensi adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan namun menghasilkan realisasi di atas target yang ditetapkan. Dimana dalam upaya pencapaian sasaran dilaksanakan dengan Program Pelayanan Penghubung, Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat. Realisasi penggunaan anggaran Sub Kegiatan untuk pendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Persentase Aktifitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang dilayani

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Sisa
Jumlah Aktifitas Koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	655.087.300,00	651.962.837,00	99,52%	3.124.463,00

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan Sumber daya anggaran telah dimaksimalkan untuk pencapaian target kinerja indikator ini. Pencapaian indikator kinerja Jumlah Aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan didukung oleh satu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20
Realisasi Capaian Kinerja Jumlah Koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Kementrian/Lembaga Asing dan Pemerintah Provinsi lainnya, Masyarakat serta Pemangku Kepentingan Lainnya	6 kali	6 kali	100%
		Rapat Koordinasi Badan Penghubung Seindonesia	1 kali	1 kali	100%
Sosialisasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Perantau dan Masyarakat serta Pemangku Kepentingan Lainnya		1 kali	1 kali	100%	

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat Capaian Kinerja Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan tercapai sesuai melebihi target sebanyak 116,67% yang didukung oleh anggaran serta terlaksananya seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

2. Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan

Dalam mencapai sasaran ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat. Badan Penghubung mengelola 3 Asrama Mahasiswa yaitu Asrama Mahasiswa Bogor, Asrama Mahasiswa Putra Merapi Singgalang Yogyakarta, Asrama Mahasiswa Putri Bundo Kandung Yogyakarta. Jumlah mahasiswa/i diasrama yang dilayani dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa yang menghuni asrama, yaitu sejumlah 26 orang di Asrama Putra Yogya, 23 orang di asrama putri yogya dan 76 orang di asrama mahasiswa Bogor.

2.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja Jumlah pembinaan Generasi Muda yang dilaksanakan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21
Pencapaian Kinerja Indikator
Jumlah Pembinaan Generasi Muda Rantau yang dilaksanakan

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2022	Kategori
		2022			
		Target	Realisasi	%	
1	Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	100 %	Sangat Baik

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Pada tahun 2022 Badan Penghubung melaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan pembinaan Generasi Muda yaitu:

- Kegiatan Motivasi Generasi Muda di Yogya
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2022 di Hotel Crystal Lotus, Yogyakarta. Peserta untuk kegiatan ini adalah sejumlah 100 orang, yang terdiri dari penghuni asrama dan mahasiswa Minang yang ada di Yogyakarta
- Kegiatan Motivasi Generasi Muda di Yogya
Kegiatan ini diselenggarakan setelah dana Perubahan anggaran tersedia, sebagai bentuk fasilitasi terhadap kegiatan mahasiswa yang ada di Yogya, pada tanggal 26 November 2022 bertempat di Hotel Crystal Lotus, Yogyakarta Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang mahasiswa yang terdiri dari Mahasiswa Minang yang menghuni Asrama Putra dan Putri di Yogyakarta serta mahasiswa dari provinsi lainnya yang ada di Yogyakarta.



Seminar Generasi Muda Minang, Hotel Crystal Lotus, 26 November 2022

- Kegiatan Motivasi Generasi Muda di Bogor
Kegiatan Motivasi Generasi Muda di Bogor ini diselenggarakan dengan melibatkan Dinas Kebudayaan provinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa Minang di Bogor tentang Adat dan Kebudayaan Minang. Acara diselenggarakan pada tanggal 3 Desember 2022 bertempat di Hotel Permata, Kota Bogor.



Seminar Generasi Muda, Hotel Permata Bogor 3 Desember 2022

Capaian kinerja indikator ini dapat dilihat dari jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$100\% = \frac{3 \text{ kali}}{3 \text{ kali}} \times 100\%$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indikator Kedua pada Sasaran Strategis Kedua Badan Penghubung mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun karena pelaksanaan aktifitas Koordinasi dengan perantau tercapai sebanyak 100% dengan kategori “ **Sangat Baik** ”.

2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Tahun 2021 dengan 2022

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2021
		2022			
		Target	Realisasi	%	%
1	Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	100 %	-

Sumber: LKJIP Badan Penghubung Tahun 2021 dan Hasil Analisa

Jika dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat peningkatan signifikan karena tahun lalu tidak dapat dilaksanakan kegiatan pembinaan Generasi Muda Rantau karena situasi pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

2.3 Perbandingan antara realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Realisasi Kinerja Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanan dibandingkan dengan Target periode akhir Renstra sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.23
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakansampai Akhir Periode Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA/RPJMD	REALISASI TAHUN 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	4 kali	3 kali	75%

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel 3.17 diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Indikator Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakansampai Akhir Periode Renstra telah mencapai 75% dari target akhir Renstra/ RPJMD hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat dikatakan lebih banyak terlaksana, disebabkan mulainya dilonggarkan aturan PPKM sehingga kegiatan mulai bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan kerja. Badan Penghubung juga terus melakukan koordinasi sekaligus pembinaan rutin terhadap Mahasiswa Minang yang berada di Asrama Yogyakarta dan Bogor serta melibatkan mereka dalam pelaksanaan kegiatan Badan Penghubung.

1.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan pada tahun ini sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

1.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Jumlah pembinaan gerenrasi muda rantau tahun 2022 terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan awal tahun dengan kategori Sangat Baik, hal ini disebabkan faktor pendukung dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- a). Telah longgarnya aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat karena COVID -19di tahun 2022 sehingga memungkinkan bagi Badan

Penghubung melaksanakan kegiatan koordinasi dan pembinaan generasi muda rantau.

- b). Koordinasi yang baik dengan Mahasiswa rantau Minang dan melibatkan mereka secara aktif pada pelaksanaan kegiatan Badan Penghubung Tahun 2022.

1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian indikator kinerja ini Badan Penghubung juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu efisiensi adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan namun menghasilkan realisasi diatas target yang ditetapkan. Dalam hal ini upaya pencapaian sasaran dilaksanakan dengan Program Pelayanan Penghubung, Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat. Realisasi penggunaan anggaran Sub Kegiatan untuk pendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Jumlah pembinaan Generasi muda rantau yang dilaksanakan**

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Sisa
Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	655.087.300,00	651.962.837,00	99,52%	3.124.463,00

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2022

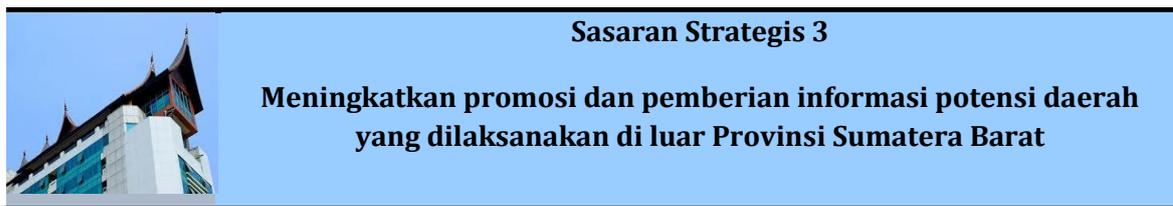
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan Sumber daya anggaran telah dimaksimalkan untuk pencapaian target kinerja indikator ini. Pencapaian indikator kinerja Jumlah pembinaan generaasi muda rantau didukung oleh satu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25
Realisasi Capaian Kinerja Jumlah Koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Kementrian/Lembaga Asing dan Pemerintah Provinsi lainnya,Masyarakat serta Pemangku Kepentingan Lainnya	6 kali	6 kali	100%
		Rapat Koordinasi Badan Penghubung Seindonesia	1 kali	1 kali	100%
		Sosialisasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Perantau dan Masyarakat serta Pemangku Kepentingan Lainnya	1 kali	1 kali	100%
		Pembinaan Generasi Muda Rantau Sumatera Barat	3 kali	3 kali	100%

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat Capaian Kinerja Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan tercapai sesuai dengantarget sebanyak 100% yang didukung oleh anggaran serta terlaksananya seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.



Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi dan sumber daya melimpah baik di bidang kesenian, kebudayaan, pendidikan, pariwisata, kuliner, kependudukan, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Sumber daya alam Sumatera Barat yang sangat produktif menjadikan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan memiliki potensi yang baik jika dikembangkan dan dikelola dengan baik. Bermodal dengan keanekaragaman jumlah *home industry local* serta potensi yang dimiliki oleh Sumatera Barat, maka untuk memperkenalkan sekaligus menjualnya kita perlu pengembangan daerah terutama pariwisata. Hal ini memerlukan upaya yang strategis dalam melakukan promosi pariwisata melalui kegiatan pameran di daerah-daerah destinasi wisata unggulan dan populer dikalangan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dalam usaha menginformasikan serta menjual Potensi Unggulan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat kepada masyarakat luas dan salah satu usaha dalam meningkatkan arus investasi ke Sumatera Barat, pada tahun 2022 dilaksanakan 2 (dua) kegiatan **Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya** serta **Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya**.

Dalam rangka menyebarkan informasi dalam pengembangan/ sarana promosi sumber daya/ potensi yang ada di Sumatera Barat, Badan Penghubung berencana melaksanakan promosi potensi daerah Sumatera Barat dalam berbagai media dan kegiatan. Pada sasaran strategis ketiga Badan Penghubung yaitu Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat dan Jumlah fasilitas pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat.

Tabel 3.26

Realisasi Kinerja Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2022	Kategori
		2022			
		Target	Realisasi	%	
1	Jumlah pelaksanaan	6	7	116,67 %	Memuaskan

	promosi potensi daerah di Sumatera Barat				
2	Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	2	2	100,00 %	Sangat Baik

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Untuk penjelasan lebih terperinci capaian indikator kinerja masing-masing sasaran Strategis “Meningkatkan Promosi dan pemberian Informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat ” dijelaskan lebih lanjut dibawah ini:

1. Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat

1.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27
Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2022	Kategori
		2022			
		Target	Realisasi	%	
1	Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat	6	7	116,67 %	Memuaskan

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Untuk mencapai sasaran ini dilakukan melalui Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Dan Pelestarian Seni Budaya dan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan Dan Pelestarian Seni Budaya. Anjungan Sumatera Barat TMII adalah Sarana untuk mempromosikan Seni, Budaya, Pariwisata dan Kuliner yang terdapat di Sumatera Barat. Karena Anjungan merupakan *Show Window* dari Sumatera Barat dalam mengenalkan dan sekaligus mempromosikan kekayaan alam, seni budaya,

kuliner kepada dunia. Anjungan Sumatera Barat merupakan salah satu Anjungan favorit yang banyak didatangi oleh para pengunjung baik Wisatawan Lokal maupun Wisatawan Mancanegara. Seiring dengan revitalisasi yang dilakukan oleh Taman Mini Indonesia Indah, Anjungan Sumatera Barat juga melakukan perbaikan dan peremajaan sarana prasarana sehingga pada saat tempat wisata ini diuji cobakan untuk dibuka ke masyarakat pada bulan Oktober 2022 makin menampilkan ciri khas tiap daerah, mulai dari rumah adat, pakaian adat, ikon daerah tersebut, hingga kuliner khas daerah.



**Kunjungan Sekjen International Organization For Standardization (ISO) di Anjungan Sumbar TMII
Selasa, 18 Oktober 2022**



Anjungan Sumatera Barat TMII menerima kunjungan delegasi United Nations Certified Development Course on Community Policing dan Police Monitoring Advising (Sabtu, 10 Desember 2022)

Pada tahun 2022 ini kita telah mencatat jumlah pengunjung yang datang ke Anjungan Sumatera Barat sebanyak :

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Wisatawan Mancanegara | = 1.230 orang |
| 2. Wisatawan Lokal/Domestik | = 8.274 orang |
| 3. Mahasiswa/Pelajar | = 761 orang |

**Data kunjungan terlampir*

Mulai Tahun akhir tahun 2022, telah dilaksanakan penghitungan jumlah pengunjung Anjungan Sumatera Barat dengan cara Scan Barcode seperti dibawah ini:



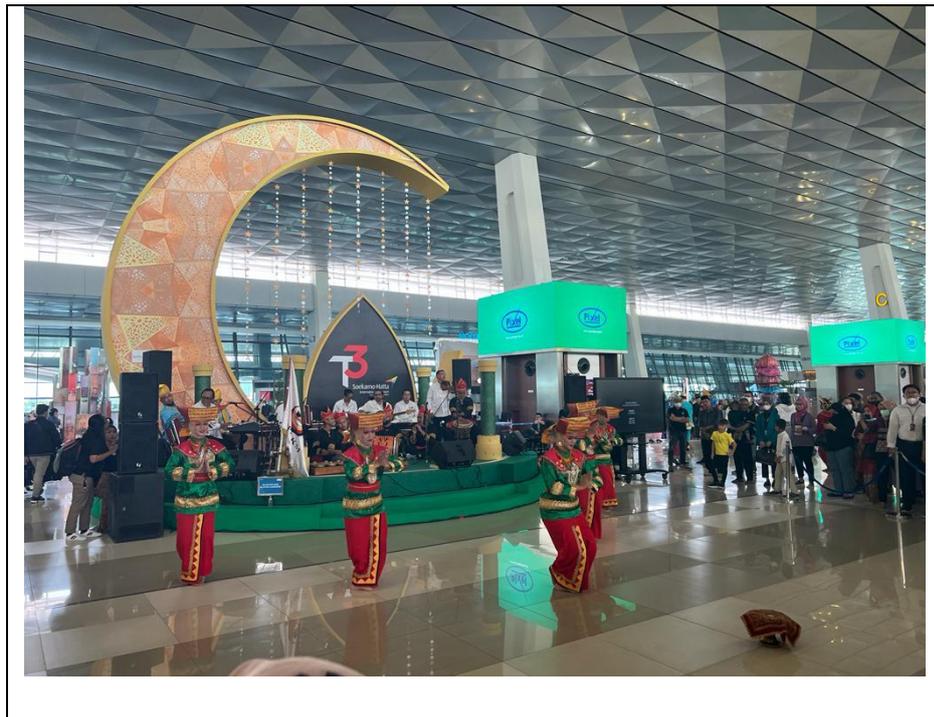
Pada Tahun 2022, Badan Penghubung melaksanakan promosi potensi sebanyak 7 kali yaitu :

1. Pekan Lebaran Tanggal 7 Juni 2022 bertempat di Anjungan Sumatera Barat TMII. Kegiatan ini menampilkan Kesenian Khas Sumatera Barat serta bazaar makanan khas Sumatera Barat.
2. Kerjasama Promosi (Festival Gamad)dengan Ikatan Keluarga Minang (IKM) Jakarta Pusat tanggal 25 Mei 2022 di Gelora Bung Karno. Kegiatan ini menampilkan salah satu jenis musik tradisional populer Minangkabau yaitu “Gamaik” yang menampilkan Grup musik SPD Sampai Hati.



3. Festival Budaya Minang tanggal 28 Oktober 2022 di Bandara Soekarno Hatta dengan Penampilan Tim Kesenian.





4. Gema Eksotika Budaya Nusantara tanggal 28 Oktober 2022 di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan Kesenian Tari dan Musik Khas Minang.



5. Paket Acara Khusus tanggal 5 November 2022 di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah Penampilan Budaya Pesona Daerah Kabupaten Padang Pariaman Sendra Tari Perjuangan Rakyat Sintuk.



6. Pawai Wira Budaya Nusantara tgl 20 November 2022 di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah



7. Pekan Desember/ Akhir Tahun 2022 tanggal 25-31 Desember 2022 di Anjungan di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah. Kegiatan ini menampilkan Kesenian Khas Sumatera Barat serta bazaar makanan khas Sumatera Barat.



Semua aktifitas promosi diatas dilaksanakan dengan anggaran Sub Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan Dan Pelestarian Seni Budaya.

Capaian Kinerja Indikator sasaran strategis ini:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$116,67\% = \frac{7 \text{ kali}}{6 \text{ kali}} \times 100\%$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Jumlah Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah Sumatera Barat pada Sasaran Strategis Ketiga Badan Penghubung mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun karena pelaksanaan aktifitas Koordinasi dengan perantau tercapai sebanyak **116,67%** dengan kategori “**Memuaskan**”.

1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Tahun 2021 dengan 2022

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2021
		2022			
		Target	Realisasi	%	%
1	Jumlah Pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat	3 kali	3 kali	100 %	150 %

Sumber: LKJIP Badan Penghubung Tahun 2021 dan Hasil Analisa

Jika dibandingkan dengan capaian target tahun lalu yang mencapai **150%**, memang mengalami penurunan secara persentase namun dalam intensitas pelaksanaan kegiatan promosi potensi daerah mengalami peningkatan yaitu dari **3 kali** menjadi **7 kali** pelaksanaan dalam tahun ini.

1.3 Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja dengan target jangka menengah

Perbandingan capaian indikator kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.29
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakansampai Akhir Periode Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA/RPJMD	REALISASI TAHUN 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	12 kali	7 kali	58 %

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel 3.16 diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Indikator Jumlah pelaksanaan promosi potensi Daerah Sumatera Baratsampai Akhir Periode Renstra telah mencapai 58%target akhir Renstra/ RPJMD hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dapat dikatakan lebih banyak terlaksana, disebabkan mulainya dilonggarkan aturan PPKM sehingga kegiatan mulai bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana semula, walaupun terkendala dengan Revitalisasi Taman Mini oleh pihak pengelola PT.Taman Wisata Candi (TWC) yang mengakibatkan Taman Mini Indonesia Indah tutup sampai dengan bulan Oktober 2022, namun Badan Penghubung terus melakukan koordinasi yang baik dengan lembaga maupun instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatanserta ikut berbenah melakukan perbaikan dan peremajaan sarana prasarana agar pada saat tempat wisata ini diuji cobakan untuk dibuka ke masyarakat pada Oktober-Desember 2022 dapat menampilkan ciri khas tiap daerah, mulai dari rumah adat, pakaian adat, ikon daerah tersebut, hingga kuliner khas daerah. Agar anjungan ini terlihat lebih menarik dan lebih terkini lagi.

1.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan pada tahun ini sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

1.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat tahun 2022 terealisasi sebesar 116,67% dari target yang ditetapkan awal tahun dengan kategori Memuaskan, hal ini disebabkan faktor pendukung dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- a). Telah longgarnya aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat karena COVID -19 di tahun 2022 sehingga memungkinkan bagi Badan Penghubung melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Promosi potensi Daerah Sumatera Barat, baik dilaksanakan di Anjungan Sumatera Barat di Taman Mini Indonesia Indah maupun tempat lain di Jakarta.
- b). Koordinasi yang baik dengan Instansi/ Lembaga/ Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat serta penggiat kesenian tradisional Sumatera Barat untuk menjembatani kerjasama dalam pelaksanaan promosi potensi daerah yang dapat ditampilkan.

1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian indikator kinerja ini Badan Penghubung juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu efisiensi adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan namun menghasilkan realisasi diatas target yang ditetapkan. Dimana dalam upaya pencapaian sasaran dilaksanakan dengan Program Pelayanan Penghubung, SubKegiatan Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Dan Pelestarian Seni Budaya . Realisasi penggunaan anggaran Sub Kegiatan untuk pendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Jumlah Pelaksanaan Promosi Potensi daerah di Sumatera Barat**

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Sisa
Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	897.985.800	896.097.192	99,79%	1.888.608,00

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan Sumber daya anggaran telah dimaksimalkan untuk pencapaian target kinerja indikator ini. Pencapaian indikator kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat didukung oleh satu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31
Realisasi Capaian Kinerja Jumlah Koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Meningkatkan Promosi Potensi dan penyebarluasan Informasi Daerah di luar Sumatera Barat	6 kali	7 kali	116,67%

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat Capaian Kinerja Jumlah Pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat tercapai melebihi target sebanyak 116,67% yang didukung oleh anggaran serta terlaksananya seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

2. Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah Sumatera Barat

2.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja Jumlah fasilitas pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.32
Pencapaian Kinerja Indikator
Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah Sumatera Barat

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2022	Kategori
		2022			
		Target	Realisasi	%	
1	Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	2 kali	2 kali	100 %	Sangat Baik

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Selain melaksanakan promosi potensi daerah di Sumatera Barat, Badan Penghubung juga melaksanakan Fasilitasi di bidang Promosi Potensi Daerah Sumatera Barat di Jakarta dan di luar Sumatera Barat. Pada tahun 2022 dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan yaitu:

- Penampilan Seni Budaya dari Sanggar Tari Yayasan Anak Indonesia (YAI) dari Kota Padang di Anjungan Sumatera Barat TMII pada bulan Desember 2022



- Penampilan Seni Budaya dari Sanggar Suluah Gelanggang dari Kota Solok di Anjungan Sumatera Barat TMII.



Capaian Kinerja Indikator sasaran strategis ini:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$100\% = \frac{2 \text{ kali}}{2 \text{ kali}} \times 100\%$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Jumlah Fasilitas pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat pada Sasaran Strategis Ketiga Badan Penghubung mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun karena pelaksanaan fasilitas promosi potensi daerah tercapai sebanyak **100%** dengan kategori “**Sangat Baik**”.

1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Tahun 2021 dengan 2022

No	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2021
		2022			
		Target	Realisasi	%	%
1	Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	3 kali	3 kali	100 %	80 %

Sumber: LKJIP Badan Penghubung Tahun 2021 dan Hasil Analisa

Jika dibandingkan dengan capaian target tahun lalu yang hanya mencapai **80%**, pelaksanaan fasilitasi promosi potensi daerah Sumatera Barat mengalami peningkatan dalam persentase, walaupun dalam hal kali pelaksanaan, mengalami penurunan jumlah dari 4 kali pelaksanaan tahun lalu menjadi 3 kali pelaksanaan di tahun 2022 ini, hal ini disebabkan Revitalisasi yang dilakukan pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah sehingga banyak kegiatan fasilitasi promosi yang seharusnya dilaksanakan di Anjungan Sumatera Barat tidak bisa dilaksanakan sesuai target. Renovasi yang dimulai sejak Januari 2022 sampai dengan Oktober 2022 sehingga menyebabkan TMII ditutup untuk umum dan pengunjung.

1.3 Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja dengan target jangka menengah

Perbandingan capaian indikator kinerja Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.34
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan sampai Akhir Periode Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA/ RPJMD	REALISASI TAHUN 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	12 kali	2 kali	16.67 %

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel 3.16 diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Indikator Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi Daerah Sumatera Barat sampai Akhir Periode Renstra hanya mencapai 16,67% target akhir Renstra/ RPJMD hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 terkendala dengan Revitalisasi Taman Mini oleh pihak pengelola PT.Taman Wisata Candi (TWC) yang mengakibatkan Taman Mini Indonesia Indah tutup sampai dengan bulan Oktober 2022, namun Badan Penghubung terus melakukan koordinasi yang baik dengan lembaga maupun instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan serta ikut berbenah melakukan perbaikan dan peremajaan sarana prasarana agar pada saat tempat wisata ini diuji cobakan untuk dibuka ke masyarakat pada Oktober-Desember 2022 dapat menampilkan ciri khas tiap daerah, mulai dari rumah adat, pakaian adat, ikon daerah tersebut, hingga kuliner khas daerah. Agar anjungan ini terlihat lebih menarik dan lebih terkini lagi.

1.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait fasilitasi promosi potensi daerah Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tahun ini sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

1.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Jumlah fasilitasi promosi potensi daerah Sumatera Barat tahun 2022 terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan tahun 2022 dengan

kategori Sangat Baik , walaupun terkendala penutupan karena revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah oleh pihak pengelola yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan promosi potensi hanya bisa dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan. Namun Badan Penghubung terus melaksanakan koordinasi yang baik dengan Instansi/ Lembaga/ Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat serta penggiat kesenian tradisional Sumatera Barat untuk menjembatani kerjasama dalam fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah yang dapat ditampilkan dan melaksanakan kegiatan tersebut dalam jangka waktu November – Desember 2022.

1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian indikator kinerja ini Badan Penghubung juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu efisiensi adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan namun menghasilkan realisasi diatas target yang ditetapkan. Dimana dalam upaya pencapaian sasaran dilaksanakan dengan Program Pelayanan Penghubung, Sub Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan Dan Pelestarian Seni Budaya. Realisasi penggunaan anggaran Sub Kegiatan untuk pendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.35

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Promosi Potensi daerah di Sumatera Barat**

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Sisa
Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	66.438.800	66.108.075	99,50%	330.725,00

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan Badan Penghubung 2022

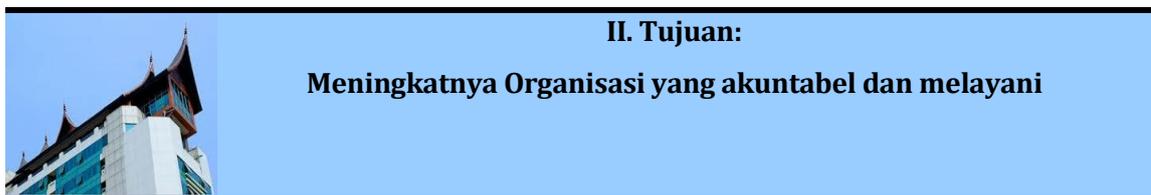
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan Sumber daya anggaran telah dimaksimalkan untuk pencapaian target kinerja indikator ini. Pencapaian indikator kinerja Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat didukung oleh satu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36
Realisasi Capaian Kinerja fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat yang dilaksanakan

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah di Sumatera Barat	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				
	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah	2kali	2 kali	100%

Sumber : Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari tabel diatas dapat dilihat Capaian Kinerja Jumlah fasilitasi Pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat tercapai sesuai target sebanyak 100% yang didukung oleh anggaran, personel serta terlaksananya seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.



Tujuan ini dicapai dengan indikator kinerja tujuan sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi**
2. **Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi**

Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama Tujuan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

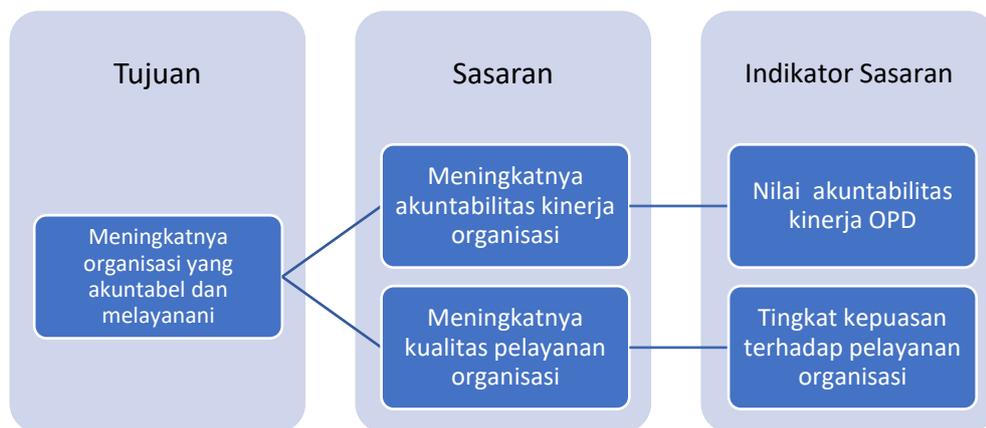
Tabel 3.37
Pencapaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B (66.00)	B (62.82)	95,18%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (78.20)	Baik (85,20%)	108,95%
Rata-Rata Capaian Indikator					102,07%

Sumber : Hasil Laporan Evaluasi Inspektorat dan Survey melalui kuesioner

Dari table 3.37 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian indicator tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani adalah sebesar 102.07%.

Tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani dicapai melalui 2 (dua) sasaran strategis yang diukur dengan 2 (dua) indicator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.2 : Tujuan II dan Sasaran Strategis

Tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani adalah hasil kerja dari organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya baik SDM maupun keuangan serta pelaksanaan kebijakan, termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berupa laporan pelaksanaan (Laporan Kinerja) setiap tahun.



Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Sasaran Strategis keempat Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta Tahun 2021-2026 yaitu meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yaitu yang diukur dengan Nilai SAKIP atau nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah merupakan indikator/tolok ukur bagaimana tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang tercermin dari bagaimana Pemerintah Daerah tersebut mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP ini diperoleh dari penilaian terhadap 5 komponen SAKIP yaitu:

1. Komponen Perencanaan Kinerja (30%),
2. Pengukuran Kinerja (25%),
3. Pelaporan Kinerja (15%),
4. Evaluasi internal (10%) dan
5. Capaian Kinerja (20%).

Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD merupakan nilai hasil evaluasi penerapan SAKIP di OPD yang evaluasinya dilakukan oleh Inspektorat Daerah setiap tahun. Range nilai evaluasi mengacu pada Permenpan 12 tahun 2015 dengan kategori Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.38

Kategori Keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	Kategori	Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang

			andal
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya sudah cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, system dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan monitor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat kurang, system tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan sangat mendasar.

1.1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.39

Pencapaian Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B (66.00)	B (62.82)	95,18%

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 mendapat nilai **62.82** dengan kategori B (interpretasi BAIK), artinya akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kinerja dengan bobot 30% dinilai 20.26%
- 2) Pengukuran kinerja dengan bobot 25% dinilai 14.72%
- 3) Pelaporan kinerja dengan bobot 15% dinilai 10.07%
- 4) Evaluasi internal dengan bobot 10% dinilai 6.30%
- 5) Pencapaian sasaran kinerja dengan bobot 20% dinilai 11,47%

Prediket evaluasi SAKIP Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tersebut berdasarkan laporan hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sesuai Surat Tugas Nomor 700/0077/Insp-SAU/2022 tanggal 3 Februari 2022.

Pengukuran tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$95.18 \% = \frac{62.82}{66.00} \times 100\%$$

Dari tabel 3.39 dapat dilihat target indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2022 adalah B (**66.00**), sedangkan realisasinya adalah B (**62.82**) maka tingkat capaiannya **95.18 %**. Dengan demikian, capaian indikator kinerja OPD tahun 2022 termasuk kategori kinerja "**Sangat Baik**".

1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun sebelumnya

Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya adalah sebagaimana tertera pada table dibawah ini:

Tabel 3.40

Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian 2022 %	Capaian 2021 (n-1) %
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	B (66.00)	B (62.82)	B (62.82)	B (60.04)

Sumber: Hasil Analisa Badan Penghubung

Dari Tabel 3.40 dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” tahun 2022 mengalami peningkatan, yaitu B dengan nilai 62.82. Capaian kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses tata kelola organisasi yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran.

1.3. Membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah

Perbandingan antara realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.41

Perbandingan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD sampai Akhir Periode RPJMD Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat 2021-2026

Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB (70)	B (62.82)	89.74%

Sumber : Hasil analisa Badan Penghubung

Tabel 3.41 memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja “Nilai akuntabilitas kinerja” pada tahun 2022 belum memenuhi target akhir Renstra yaitu baru mencapai 62.82 atau dengan capaian sebesar 89.74%. Capaian kinerja ini akan menjadi perhatian

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran sehingga kedepannya dapat lebih memperhatikan tingkat kemajuan hasil capaian

1.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait Badan Penghubung sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

1.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 terealisasi sebesar 95.18% dari target yang ditetapkan tahun 2022 dengan kategori Sangat Baik dan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, pada tahun 2022 Badan Penghubung mengalami peningkatan dalam nilai evaluasi SAKIP secara keseluruhan. Usaha perbaikan yang telah dilakukan Badan Penghubung antara lain:

- Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai dari level Kepala Badan sampai dengan Staf termasuk target kinerjanya secara proporsional melalui proses cascading kinerja;
- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian indikator kinerja ini Badan Penghubung juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu efisiensi adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan namun menghasilkan realisasi diatas target yang ditetapkan. Dimana dalam upaya pencapaian sasaran dilaksanakan dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.42
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Utama
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

NO	KODE REKENING	URAIAN	DANA Rp.	REALISASI		KETR. (SISA ANGGARAN)	
				Fisik %	Keuangan Rp. %		
1	2	3	4	6	7	8	9
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	6.517.297.509	100.00	6.027.546.831	92.01	489.750.678
	5.07.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.537.000	100.00	91.421.836	95.69	4,115,164
1	5.07.01 1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.405.000	100.00	3,149,800.00	92.51	255
2	5.07.01 1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	42.891.000	100.00	41.531.917	96.83	1,359,083
3	5.07.01 1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	42.891.000	100.00	41.734.219	97.30	1,156,781
4	5.07.01 1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.350.000	100.00	5.005.900	78.83	1,344,100
	5.07.01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.421.760.509	100.00	5.936.124.995	92.44	485,635,514
5	5.07.01 1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,195,928,509	100.00	5.713.131.647	92,21	482,796,862
6	5.07.01 1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	184,439,000	100.00	181,814,215.00	98.58	2,624,785
7	5.07.01 1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14,714,000	100.00	14,654,011.00	99.59	60
8	5.07.01 1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	26,679,000	100.00	26,525,122.00	99.42	154

Dari tabel 3.42 dapat dilihat bahwa efisiensi yang telah dilakukan dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah sebesar Rp. 489.750.678 atau sebesar 7.51 %.

Selain anggaran efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah dengan merealisasikan belanja pegawai seefisien mungkin sesuai dengan kebutuhan dan fasilitas yang ada serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya.

Pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tidak terlepas dari dukungan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan melalui anggaran APBD. Secara keseluruhannya pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan ini tercapai dengan baik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

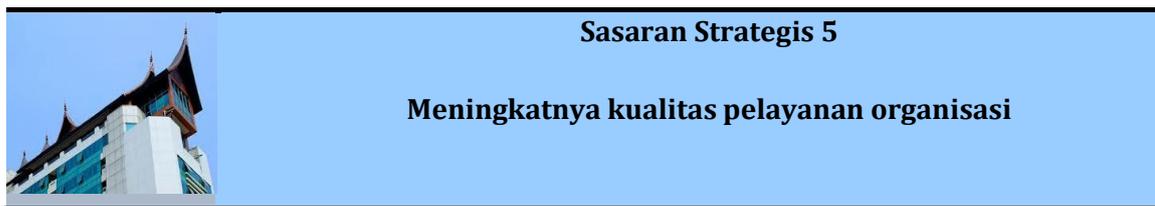
Tabel 3.43
Realisasi Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Badan Penghubung yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Badan Penghubung yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA Badan Penghubung yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Evaluasi (Realisasi Kinerja, Lakip, LPPD, LKPJ) Badan Penghubung yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Badan Penghubung dan calon ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	54 orang	54 orang	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Badan Penghubung yang mendapatkan honor	11 orang	11 orang	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Badan Penghubung	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan/triwulan/semester Badan Penghubung yang disiapkan	18 dokumen	18 dokumen	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat Capaian Kinerja Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi tercapai sesuai target sebanyak 100% yang didukung oleh anggaran, personel serta terlaksananya seluruh kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Implementasi SAKIP pada tahun 2023 Badan Penghubung akan melakukan beberapa hal, diantaranya:

- Reviu Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung dan hasil pelaksanaan reviu akan ditindaklanjuti dengan revisi Renstra;
- Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penghubung termasuk pada metode pengukuran setiap IKU;
- Pelatihan penyusunan Laporan Kinerja kepada seluruh pegawai yang mendapatkan penugasan sebagai penyusun Laporan Kinerja.



Sasaran Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta Tahun 2021-2026 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi yang diukur dengan tingkat kepuasan ini untuk menilai tingkat kepuasan ASN/Non ASN yang diberikan pelayanan oleh Organisasi. Pelayanan yang dimaksud disini merupakan pelayanan yang diberikan kepada ASN/Masyarakat/Organisasi yang menjadi *stakeholder* dari OPD yang bersangkutan. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan Yang digunakan untuk pengukuran adalah:

Tabel 3.44

Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00-64,99	D	Tidak Baik
65,00-76,60	C	Kurang Baik
76,61-88,30	B	Baik
88,31-100,00	A	Sangat Baik

METODE PENGHITUNGAN :

Perhitungan menggunakan Skala 1 sampai 4

Pilihan A bernilai 4

Pilihan B bernilai 3

Pilihan C bernilai 2

Pilihan D bernilai 1

2.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepadapengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat peggunalayanan. Survei ini dilakukan dengan kuesioner dan hasil analisa survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Tahun 2022 dilaksanakan survey dengan pembagian kuesioner pelayanan publik, baik fisik maupun via e-survei (melalui *google form* dengan format yang sama) pada beberapa *stakeholders* Badan Penghubung yang terdiri dari Ajudan/Protokoler Pimpinan Daerah yang diberikan Pelayanan, Organisasi Masyarakat Perantau Minang, Mahasiswa Asrama yang dibina, OPD/ASN yang difasilitasi pengurusan kepentingannya serta para pengunjung Anjungan Sumatera Barat di Taman Mini. Total pertanyaan pada kuesioner sebanyak 11 pertanyaan pilihan berganda dengan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Total kuesioner yang dikumpulkan sebanyak 37 responden dengan hasil pengolahan sebagai berikut:

Pengitungan Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai pengolahan kuesioner:

$$\text{Indeks Kepuasan Masyarakat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$85.20\% = \frac{1387}{1628} \times 100\%$$

Dari penghitungan pengolahan kuesioner yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan Nilai **85.20%** makan pelayanan Badan Penghubung terhadap *stakeholdersnya* tergolong Mutu Pelayanan **B** dengan Kinerja Unit Pelayanan **BAIK**.

Pengukuran tingkat capaian kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$108.95 \% = \frac{85.20}{78.20} \times 100\%$$

Tabel 3.45
Pencapaian Kinerja Indikator Tingkat Kepuasan
Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	78.20	85.20	108.95%

Sumber : Hasil analisa Badan Penghubung

Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori kinerja "**Memuaskan**".

2.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun sebelumnya

Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya adalah sebagaimana tertera pada table dibawah ini:

Tabel 3.46
Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan
OPD Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian 2022 %	Capaian 2021 (n-1) %
1	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan OPD	Nilai	B (78.20)	B (85.20)	B (108.95)	-

Sumber : Hasil analisa Badan Penghubung

Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan penilaian capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Organisasi.

2.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Capaian indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan OPD dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sebagaimana tertera pada table dibawah ini:

Tabel 3.47

Perbandingan Capaian Indikator Indikator Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan OPD sampai Akhir Periode RPJMD Renstra Badan Penghubung 2021-2026

Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan OPD	Baik (80)	B (85.20)	106.50%

Sumber : Hasil analisa Badan Penghubung

Tabel 3.47 memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja “Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi” pada tahun 2022 telah melampaui target akhir Renstra yaitu 80.00 atau dengan capaian sebesar 106.50%. Capaian kinerja ini tentu akan menjadi pemicu bagi Badan Penghubung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders* yang dilayaninya.

2.4 Perbandingan antara target dengan realisasi Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Nasional

Tidak Terdapat Perbandingan Data Capaian Kinerja Nasional terkait Badan Penghubung sehingga tidak dapat dibuat perbandingan untuk pengukuran indikatornya.

2.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Internal Organisasi tahun 2022 terealisasi sebesar 108.95% dari target yang ditetapkan tahun 2022 dengan kategori Memuaskan. Usaha perbaikan yang telah dilakukan Badan Penghubung antara lain:

Usaha perbaikan dalam peningkatan pelayanan publik atau *stakeholders* yang telah dilakukan Badan Penghubung antara lain:

- Penambahan tenaga pelayanan pimpinan daerah baik itu tenaga protocol ataupun supir;
- Terus melakukan koordinasi dan *Sharing* Informasi ke Biro Administrasi Pimpinan dan Kerjasama Pemerintah Provinsi lainnya terkait pelayanan pimpinan dan pengurusan kepentingan;
- Melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan organisasi/paguyuban masyarakat rantau Sumatera Barat, baik di Jakarta maupun luar Provinsi Sumatera Barat;
- Melaksanakan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat terkait sumber potensial promosi daerah;

Dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2023 Badan Penghubung akan melakukan beberapa hal, diantaranya:

- Pelaksanaan pelatihan keprotokolan bagi protokol sehingga dapat meningkatkan kapabilitas personel pelayanan pimpinan daerah;
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi masyarakat rantau;
- Mengembangkan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- Meningkatkan kualitas sarana prasarana untuk kenyamanan pengunjung di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah.

1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Program/Kegiatan Yang menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian indikator kinerja ini Badan Penghubung juga melakukan efisiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu efisiensi adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan namun menghasilkan realisasi diatas target yang ditetapkan. Dimana dalam upaya pencapaian sasaran dilaksanakan dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.48
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

KODE REKENING	URAIAN	DANA Rp.	Fisik %	REALISASI		KETR. (SISA ANGGARAN)
				Keuangan Rp.	%	
2	3	4	6	7	8	9
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	6.590.672.775	100.00	6.032.633.954	91,53%	558.038.821
5.07.01 1.03	Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah	298.607.500	100.00	262.279.076	87.83	36.328.424
5.07.01 1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	41,118,000	100.00	38,666,050.00	94.04	2,451,950
5.07.01 1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	163,742,000	100.00	134,310,397.00	82.03	29,431,603
5.07.01 1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	93,747,500	100.00	89,302,629.00	95.26	4,444,871
5.07.01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	207.546.978	100.00	190.904.239	91.98	16.642.739
5.07.01 1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	63,750,000	100.00	57,649,515.00	90.43	6,100,485
5.07.01 1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	112,376,978	100.00	105,025,342.00	93.46	7,351,636
5.07.01 1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	31,420,000	100.00	28,229,382.00	89.85	3,190,618
5.07.01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	923.189.145	100.00	890.240.465	96.43	32.948.680
5.07.01 1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,562,400	100.00	16,452,660.00	99.34	110
5.07.01 1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	228,810,095	100.00	220,549,600.00	96.39	8,260,495
5.07.01 1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109,029,300	100.00	108,121,210.00	99.17	908
5.07.01 1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77,884,550	100.00	74,514,920.00	95.67	3,369,630
5.07.01 1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,580,000	100.00	5,304,000.00	95.05	276
5.07.01 1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	51,000,000	100.00	50,978,816.00	99.96	21
5.07.01 1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	434,322,800	100.00	414,319,259.00	95.39	20,003,541
5.07.01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dae	2.345.384.890	99.98	1.927.927.278	82.20	417.457.612
5.07.01 1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217,164,890	100.00	216,361,500.00	99.63	803
5.07.01 1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,471,290,000	100.00	1,449,386,133.00	98.51	21,903,867
5.07.01 1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	656,930,000	99.95	262,179,645.00	39.91	394,750,355
5.07.01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.184.724.262	100.00	2.166.299.592	99.16	18.424.670
5.07.01 1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,263,500	100.00	14,260,000.00	99.98	4
5.07.01 1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330,938,000	100.00	327,460,209.00	98.95	3,477,791
5.07.01 1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,839,522,762	100.00	1,824,579,383.00	99.19	14,943,379
5.07.01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah D	631.220.000	100.00	594.983.304	94.26	36.236.696
5.07.01 1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263,750,000	100.00	236,162,049.00	89.54	27,587,951
5.07.01 1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31,070,000	100.00	22,968,600.00	73.93	8,101,400
5.07.01 1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	336,400,000	100.00	335,852,655.00	99.84	547

Dari tabel 3.48 dapat dilihat bahwa efisiensi yang telah dilakukan dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah sebesar Rp. 558.038.821 atau sebesar 8.47 %.

Selain anggarane efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi adalah dengan merealisasikan belanja pengadaan

dan pemeliharaan barang sesuai dengan tagihan, pembayaran belanja rutin bulanan seperti tagihan listrik, air dan telepon sesuai dengan tagihan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya.

Pencapaian indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tidak terlepas dari dukungan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan melalui anggaran APBD. Secara keseluruhannya pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan ini tercapai dengan baik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.49
Realisasi Capaian Kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Indikator Kinerja Utama	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN					
	Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah					
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen usulan RKBMD pengadaan, pemindahtangan, pemanfaatan dan penghapusan serta perhitungan standar kebutuhan Badan Penghubung yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	100%
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan administrasi yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
			Jumlah unit yang dilakukan penjagaan 30 Unit	30 unit	30 unit	100%
		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan Penertiban	10 dokumen	10 dokumen	100%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	96 orang	96 orang	100%
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	100%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti	5 orang	6 orang	120%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	240 buah	240 buah	100%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	4 jenis	4 jenis	100%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Makanan dan minuman yang di sediakan untuk pertemuan	4 jenis & 12 bulan	4 Jenis & 12 bulan	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	3 jenis	3 jenis	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	2 jenis	2 jenis	100%	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tamu yang dilayani	12 bulan	12 bulan	100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	55 dokumen	55 dokumen	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	20 unit	20 unit	100%	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang disewa (Kantor, Rumah jabatan dan Mess karyawan)	4 unit	4 unit	100%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor (Post Satpam, Tempat Parkir Motor dan Landscape di Anjungan Sumatera Barat TMII)	5 paket	5 paket	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 Tahun	185 surat	185 surat	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan air yang dibayarkan Jumlah tagihan internet dan VVN-IP yang dibayarkan Jumlah tagihan internet dan VVN-IP yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan Jumlah tagihan telpon yang dibayarkan Jumlah tagihan tagihan telpon yang dibayarkan	5800 meter kubik 100 mbps, 180000 KVA, 123400 KVA,5 rekening	5800 meter kubik 100 mbps, 180000 KVA, 123400 KVA,5 rekening	100%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	31 orang	31 orang	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	22 unit	22 unit	100%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51 unit	51 unit	100%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Anjungan Sumatera Barat di TMII yang di Pelihara, Jumlah Gedung Asrama Mahasiswa Bogor dan Yogyakarta yang di Pelihara , Jumlah Gedung Asrama Mahasiswa Bogor dan Yogyakarta yang di Pelihara , Jumlah Plang nama Kantor	1 unit, 3 unit, 2 unit	1 unit, 3 unit, 2 unit	100%	

D. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2022, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2022, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 3.50
Tabel Anggaran Badan Penghubung Tahun 2022

No.	Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Penghubung	Rp. 4.273.558.498,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 13.107.970.284,-

Pada Tahun 2022 Capaian Realisasi Fisik kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung mencapai 100% sementara realisasi keuangan mencapai 93.22 %.

Berikut adalah Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan pada Badan Penghubung Tahun 2022:

Tabel 3.51
Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT
BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TAK LANGSUNG
URUSAN : PENUNJANG KOORDINASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DENGAN PEMERINTAH PUSAT
KEADAAN S/D AKHIR BULAN : DESEMBER 2022

OPD : BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROV. SUMBAR

NO	KODE REKENING	URAIAN	DANA Rp.	Fisik %	REALISASI		KETR. (SISA ANGGARAN)
					Rp.	%	
1	2	3	4	5	7	8	9
		TOTAL ANGGARAN	17.381.528.782	100,00	16.203.333.836	93,22	1.178.194.946
I	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	13.107.970.284	100,00	12.060.180.785	92,01	1.047.789.499
	5.07.01.1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>95.537.000</i>	<i>100,00</i>	<i>91.421.836,00</i>	<i>95,69</i>	<i>4.115.164</i>
1	5.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.405.000	100,00	3.149.800,00	92,51	255.200
2	5.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	42.891.000	100,00	41.531.917,00	96,83	1.359.083
3	5.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	42.891.000	100,00	41.734.219,00	97,30	1.156.781
4	5.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.350.000	100,00	5.005.900,00	78,83	1.344.100
	5.07.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>6.421.760.509</i>	<i>100,00</i>	<i>5.936.124.995</i>	<i>92,44</i>	<i>485.635.514</i>
5	5.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.195.928.509	100,00	5.713.131.647	92,21	482.796.862
6	5.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	194.439.000	100,00	181.814.215,00	93,58	2.624.785
7	5.07.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.714.000	100,00	14.654.011,00	99,59	59.989
8	5.07.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	26.679.000	100,00	26.525.122,00	99,42	153.878
	5.07.01.1.03	<i>Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>298.607.500</i>	<i>100,00</i>	<i>262.279.076,00</i>	<i>87,83</i>	<i>36.328.424</i>
9	5.07.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	41.118.000	100,00	38.666.050,00	94,04	2.451.950
10	5.07.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	163.742.000	100,00	134.310.397,00	82,03	29.431.603
11	5.07.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	93.747.500	100,00	89.302.629,00	95,26	4.444.871
	5.07.01.1.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>207.546.978</i>	<i>100,00</i>	<i>190.904.239,00</i>	<i>91,98</i>	<i>16.642.739</i>
12	5.07.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	63.750.000	100,00	57.649.515,00	90,43	6.100.485
13	5.07.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	112.376.978	100,00	105.025.342,00	93,46	7.351.636
14	5.07.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	31.420.000	100,00	28.229.382,00	89,85	3.190.618
	5.07.01.1.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>923.189.145</i>	<i>100,00</i>	<i>890.240.465,00</i>	<i>96,43</i>	<i>32.948.680</i>
15	5.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.562.400	100,00	16.452.660,00	99,34	109.740
16	5.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	228.810.095	100,00	220.549.600,00	96,39	8.260.495
17	5.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.029.300	100,00	108.121.210,00	99,17	908.090
18	5.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77.884.550	100,00	74.514.920,00	95,67	3.369.630
19	5.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.580.000	100,00	5.304.000,00	95,05	276.000
20	5.07.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	51.000.000	100,00	50.978.816,00	99,96	21.184
21	5.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	434.322.800	100,00	414.319.259,00	95,39	20.003.541
	5.07.01.1.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>2.345.384.890</i>	<i>99,98</i>	<i>1.927.927.278,00</i>	<i>82,20</i>	<i>417.457.612</i>
22	5.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217.164.890	100,00	216.361.500,00	99,63	803.390
23	5.07.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.471.290.000	100,00	1.449.386.133,00	98,51	21.903.867
24	5.07.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	656.930.000	99,95	262.179.645,00	39,91	394.750.355
	5.07.01.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>2.184.724.262</i>	<i>100,00</i>	<i>2.166.299.592,00</i>	<i>99,16</i>	<i>18.424.670</i>
25	5.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.263.500	100,00	14.260.000,00	99,98	3.500
26	5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.938.000	100,00	327.460.209,00	98,95	3.477.791
27	5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.839.522.762	100,00	1.824.579.383,00	99,19	14.943.379
	5.07.01.1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>631.220.000</i>	<i>100,00</i>	<i>594.983.304,00</i>	<i>94,26</i>	<i>36.236.696</i>
28	5.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Pertinisan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263.750.000	100,00	236.162.049,00	89,54	27.587.951
29	5.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.070.000	100,00	22.968.600,00	73,93	8.101.400
30	5.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	336.400.000	100,00	335.852.655,00	99,84	547.345
II	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	4.273.558.498	100,00	4.143.153.051,00	96,95	130.405.447
	5.07.02.1.01	<i>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</i>	<i>4.273.558.498</i>	<i>100,00</i>	<i>4.143.153.051,00</i>	<i>96,95</i>	<i>130.405.447</i>
31	5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	61.250.000	100,00	53.570.000,00	87,46	7.680.000
32	5.07.02.1.01.02	Pelayanan Kelambagaan Aparatur dan Masyarakat	655.087.300	100,00	651.962.837,00	99,52	3.124.463
33	5.07.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	897.985.800	100,00	896.097.192,00	99,79	1.888.608
34	5.07.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	66.438.800	100,00	66.108.075,00	99,50	330.725
35	5.07.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.592.796.598	100,00	2.475.414.947,00	95,47	117.381.651

Pada tahun 2022 Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 2 (dua) program dengan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan yang mempedomani tujuan dan sasaran serta visi dan misi Pemerintah Daerah yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi misi RPJMD serta tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan masing-masing Analisa Capaian Sasaran tersebut diatas, disimpulkan bahwa dari 5 (lima) sasaran yang ditetapkan, semuanya dapat mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja bahkan ada yang melebihi dari 100% yaitu pada Sasaran kedua dan ketiga. Secara rata-rata Capaian Sasaran Strategis Badan Penghubung pada tahun 2022 yaitu **104,03%** dengan kategori **“Memuaskan”**.

Selanjutnya, guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Menggunakan informasi pada Laporan ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program / kegiatan tahun selanjutnya dan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. Pelaksanaan pelatihan keprotokolan bagi protokol dan sopir sehingga dapat meningkatkan kapabilitas personel pelayanan pimpinan daerah;
- d. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi masyarakat rantau;
- e. Meningkatkan kualitas sarana prasarana untuk kenyamanan pengunjung di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah serta memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- f. Memperkuat komitmen dari semua ASN dan pegawai Badan Penghubung untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang prima sebagai Duta Sumatera Barat di Jakarta.

BAB IV
PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat. Laporan kinerja ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauh mana manfaat pelayanan bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Program/Kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis SKPD Badan Penghubung Tahun 2021 – 2026 dengan capaian kinerja sangat baik. Masih terdapat upaya-upaya perbaikan kinerja yang harus dilaksanakan pimpinan dan staf Badan Penghubung untuk mewujudkan kinerja yang lebih akuntabel.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini dibuat. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi, penilaian serta referensi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2023

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT**



ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP.M.Soc.Sc.Ph.D
Pembina Tk.I/NIP.19800904 199810 1 002

